YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENYELENGGARAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN FISIK SECARA PARTISIPATIF DI DESA PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

SKRIPSI

Di ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Fisterman Jaya Zega
147310659

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama	:	Fistermanjaya Zega
NPM	:	147310659
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Penyelenggaraan Koordinasi Pembangunan Fisik Secara Partisipatif di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komferensif.

Pekanbaru,28 Februari 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Budi Mulianto, S.IP., M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

N a m a	: Fisterman Jaya Zega
NPM	: 147310659
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Penyelenggaraan Koordinasi Pembangunan Fisik Secara Partisipatif di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukakn perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 08 Mei 2020
An. Tim Penguji

Ketua,

Dr. Khairul Rahman, S. Sos., M.Si

Sekretaris,

Data Wardana, S.Sos., M.Si

Anggota

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Dr.H.Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Prodi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Budi Mulianto, S.IP., M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 05 Mai 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 06 Mai 2020 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a	:	Fisterman Jaya Zega
NPM	:	147310659
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	***Penyelenggaraan Koordinasi Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Didesa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.***
Nilai Ujian	:	Angka : " " ; Huruf : " "
Keputusan Hasil Ujian	:	Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji	:	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si	Ketua	1.
2.	Data wardana, S. Sos.., M. IP	Sekretaris	2.
3.	Rizky Setiawan S	Anggota	3.

Pekanbaru, 06 Mai 2020
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

N a m a	: Fisterman Jaya Zega
NPM	: 147310659
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Penyelenggaraan Koordinasi Pembangunan Fisik Secara Partisipatif di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukakn perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 08 Mei 2020
An. Tim Penguji

Ketua,

Dr. Khairul Rahman, S. Sos., M.Si

Sekretaris,

Data Wardana, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Dr.H.Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Prodi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Budi Mulianto, S.IP., M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN..... **iii**

KATA PENGANTAR..... **iv**

DAFTAR ISI..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR GAMBAR..... **xi**

DAFTAR LAMPIRAN..... **xii**

BAB I : PENDAHULUAN..... **1**

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 18

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian..... 18

1. Tujuan Penelitian..... 18

2. Keguanaan Penelitian 19

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR **20**

A. Studi Kepustakaan 20

1. Pengertian ilmu Pemerintahan..... 20

2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan 23

3. Konsep Manajemen Pemerintahan 29

4. Konsep Pembangunan 32

5. Konsep Pemerintah Desa..... 34

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Konsep Pembangunan Desa 38

7. Konsep Pelaksanaan Tugas 40

8. Konsep Partisipatif 41

9. Konsep Koordinasi 49

B. Kerangka Pikiran 53

C. Hipotesis 53

D. Konsep Operasional 54

E. Operasional Variabel 56

BAB III : METODE PENELITIAN 57

A. Tipe Penelitian 57

B. Lokasi Penelitian 57

C. Informan Penelitian 57

D. Instrument Penelitian 59

E. Jenis dan Sumber Data 60

F. Teknik Pengumpulan Data 60

G. Teknik Analisis Data 61

H. Jadwal Kegiatan Penelitian 62

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 63

A. Sejarah Perkembangan Desa Pinang Sebatang Timur 63

1. Sejarah Kampung 63

2. Demografi 63

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Keadaan Sosial 64

4. Keadaan Ekonomi 67

B. Pembagian Wilayah Desa..... 68

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa 70

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 75

A. Identitas Informan 75

1. Pendidikan 75

2. Berdasarkan Tingkat Umur 77

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan..... 78

1. Mengadakan Pertemuan Resmi 78

2. Adanya Kerja sama 86

3. Mengadakan Pertemuan Informal 91

4. Mengangkat Suatu Tim 96

BAB VI : PENUTUP 99

A. Kesimpulan..... 99

B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 104

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji syukur kehadirat Tuhana Yang Maha Esa, yang mana be rkat rahmat dan hidayatnya penulis mampu membuat sebuah karya ilmiah yang berjudul Penyelenggaraan Koordinasi Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Penulis mengetahui usulan penelitian ini masih terdapat beberapa kesalahan maupun kekurangan dalam penulisan ini, karna sesungguh nya manusia masih jauh dari kata sempurna dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.

Penulis menyadari penulisan ini bisa dilakukan karna adanya dorongan dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dan berperan dalam terselesaikannya usulan penelitian ini, dan penulis sangat mengucapkan terima kasih yang banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk bisa menuntut ilmu pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR, semoga dengan pimpinan Bapak sebagai Dekan FISIPOL UIR lahir nya para pemimpin dan penerus bangsa yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa.
3. Bapak Budi Mulianto, S.Ip., M.Si selaku Kepala Prodi jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah mengembangkan dan memajukan jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan masukan yang bermanfaat demi terciptanya penulisan usulan penelitian ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Bapak Rizky Setiawan, S.Ip, M,Si sebagai pembimbing II yang sudah mangarahkan agar penulisan usulan penelitian ini bisa baik dan benar.
6. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik saya selama saya menimba ilmu di jursan ilmu Pemerintahan.
7. Kepala dan Staff karyawan TU yang telah membantu saya dalam mendapatkan informasi dan pengurusan administrasi selama saya menjadi mahasiswa Fisipol.
8. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan dan memberi dukungan secara moril maupun materil, serta tidak pernah lelah memberikan semangat dan motiviasi dalam penulisan usulan penelitian ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan dan teman-teman yang terlibat dalam penulisan ini yang selalu memberi semangat dan dukungan.

Penulis berdoa dan bermohon semoga jasa mereka semua dibalas dengan rahmat dan karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa, amin..

Penulis berharap tulisan usulan penelitian ini bisa bermanfaat dan bisa diajukan untuk penyusunan skripsi.

Pekanbaru, 28 Feberiari 2020

Penulis

Fistermanjaya Zega

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

II.1 Operasional Variabel Penelitian tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 56

IV.1 Jumlah Penduduk Yang Tersebar di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang kabupaten siak 64

IV.2 Jumlah Tingkat Pendidikan di di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang kabupaten siak 2018/2019 65

IV.3 Jumlah Pekerjaan di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang kabupaten siak 2018/2019 66

IV.1 Jumlah Kepemilikan Ternak di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang kabupaten siak 2018/2019 66

IV.1 Jumlah Sarana dan Prasarana di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang kabupaten siak 2018/2019 66

V.1 Jumlah Respunden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tentang Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 76

V.1 Jumlah Respunden Berdasarkan Tingkat Umur Tentang Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 77

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

II. 1. Kerangka Pikir dari Penelitian Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pembangunan Secara Partisipastif di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 53

IV.1. Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Pinang Sebatang Timur..... 69

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara Musyawarah Kampung Pinang Sebatang Timur

Lampiran 2 Notulen Rapat MUSRENBANG

Lampiran 3 Materi Rapat MUSRENBANG

Lampiran 4 Daftar Hadir

Lampiran 5 Foto Dokumentasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Surat Pernyataan

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif UP yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fistermanjaya Zega
NPM : 147310659
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : strata satu (S.1)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah UP ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya Plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa, apabila di kemudian hari di temukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya bersedian menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Februari 2020

Pelaku pernyataan,

Fistermanjaya Zega

DAFTAR ISI

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PENYELENGGARAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN FISIK SECARA PARTISIPATIF DI DESA PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

ABSTRAK

FISTERMAN JAYA ZEGA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tugas Staff Desa dalam mengkoordinasikan pembangunan fisik di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sebagaimana diketahui bahwa Staff Desa sebagaia aparatur negara yang bertangung jawab dalam mengkoordinasi pembangunan fisik secara partisipatif di Desa Pinang Sebatang Timur. Seperti yang di ketahui pembangunan secara fisik di Desa Pinang Sebatang Timur tidak terlaksana dengan baik, karena kurangnya kerjasama antara staff desa dan masyarakat setempat. Peran Staff Desa sangat dibutuhkan untuk terselenggaranya pembangunan di Desa Pinang Sebatang Timur menjadi lebih baik, namun hal ini tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan penuh dari pemerintah kabupaten siak, tokoh masyarakat, masyarakat setempat dan organisasi- organisasi yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur. Indikator penelitian dalam penelitian ini menggunakan teori Farland dengan empat item penelitian yaitu; Mengadakan pertemuan resmi, Adanya kerjasama, Mengadakan pertemuan informal dan Mengangkat suatu tim. Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka metode penelitian ini Kualitatif tipe Deskriptif. Hasil ini menunjukan bahwasanya Staff Desa cukup berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan fisik di Desa Pinang Sebtang Timur. Faktor penghambatnya yaitu; Kurangnya pertemuan resmi, Kurangnya kerja sama, Kurangnya pertemuan informal dan Kurangnya tim khusus untuk menjalankan pembangunan desa.

Kata Kunci : Penyelenggaraan, Pembangunan, Terlaksana, Staff Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

IMPLEMENTATION OF PARTICIPATIVE PHYSICAL DEVELOPMENT COORDINATION IN PINANG SEBATANG VILLAGE EAST DISTRICT TUALANG SIAK REGENCY

ABSTRACT

FISTERMAN JAYA ZEGA

This study aims to determine and explain the task of the Village Staff in coordinating physical development in Pinang Sebatang Timur Village, Tualang District, Siak Regency, as it is known that the Village Staff is a state apparatus responsible for coordinating participatory physical development in Pinang Sebatang Timur Village. As is known, physical development in the village of Pinang Sebatang Timur was not carried out properly, due to the lack of cooperation between village staff and the local community. The role of the Village Staff is very much needed for the better implementation of development in Pinang Sebatang Timur Village, but this cannot be done without full support from the Siak district government, community leaders, local communities and organizations in Pinang Sebatang Timur Village. The research indicators in this study use Farland's theory with four research items namely; Hold formal meetings, collaborate, hold informal meetings and appoint a team. In accordance with the problems of this study, the research method is qualitative descriptive type. These results indicate that the Village Staff is quite active in the implementation of physical development in the East Pinang Sebtang Village. The inhibiting factors are; Lack of official meetings, Lack of cooperation, Lack of informal meetings and Lack of special teams to carry out village development.

Keywords: Implementation, Development, Implemented, Village Staff

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suata wilayah di permukaan bumi yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara *indepedent*. Negara juga merupakan suatu wilayah yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut.

Keberadaan pemerintah daerah mendapat landasan yuridis dengan dicantumkannya dalam Pasal 18 UUD 1945. Pada ayat (1) disebutkan " Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota yang tiap kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah tersendiri". Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota pada dasarnya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Meskipun demikian daerah-daerah yang diberikan kewenangan-kewenangan otonomi tersebut bukan merupakan Negara bagian (*state*) melainkan daerah yang tidak terpisahkan dari dan dibentuk dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan negara adalah "melindungi segenap bangsa indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut, maka pemerintah telah menetapkan susunan pemerintah secara bertingkat yakni pemerintahan pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa sebagaimana telah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua dalam pasal ini tercantum tentang bagaimana pemerintah dalam mengatur daerahnya masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut atas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Dearah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah proses penyelenggaraan otonomi merupakan jawaban yang sangat tepat dalam mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara Demokratis. Pengembangan dan pembangunan otonomi daerah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas pada pemerintah daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan disegala bidang baik didaerah maupun di desa.

Otonomi daerah memiliki arti otonomi desa bahwa desa mampu berinisiatif dan berkreativitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta menumbuhkan demokrasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga desa atau setingkat desa memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan karena tidak terbebani lagi dengan program-program pembangunan dari kabupaten/ kota, provinsi maupun pemerintah pusat.

Tugas dan wewenang pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 10 tentang pemerintah daerah, yaitu:

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi:
   a. Politik luar negeri
   b. Pertahanan
   c. Keamanan
   d. Yustisi
   e. Moneter dan fisikal, dan
   f. Agama
4. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah atau pemerintahan desa.
5. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3,
   a. pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah; atau

c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

1. Dalam pemerintahan daerah kabupaten/ kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
2. Pembentukan, penghapusan, atau penggabungan desa dengan memperlihatkan hak asal usulnya atas prakarsa masyarakat.
3. Desa di kabupaten/ kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Perda.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, 2, 3, 4, 5 tentang Desa yang baru ditetapkan menjelaskan bahwa:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarakan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan namalain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarahantara Badan Permusyawaratan Desa, PemerintahDesa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Didalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 di sebutkan bahwa kepala Desa bertugas, menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, membina kemasyarakatan Desa, pemberdayaan kemasyarakatan Desa. Menurut Hanif Nurcholis (2011;77) Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan,dan kemasyarakatan.

Menurut siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha dan pertumbuhan dan perubahan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (national building).

Kepala desa meskipun sebagai pimpinan di desa yang harus mampu mempelopori pembangunan harus didukung oleh masyarakatnya. Kepala Desa harus mampu meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat, kepala desa harus mampu menggerakkan masyarakatnya agar sadar lingkungan, mampu mengembangkan usaha ekonomi desa dan mengembangkan keuangan desa. Sebagai pembuat kebijaksanaan bersama-sama dengan lembaga-lembaga lain yang dibentuk, Kepala Desa juga sekaligus sebagai pelaksana kebijaksanaan dan melakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan di desanya. Agar pembangunan yang diharapkan dapat terwujud, maka Kepala Desa harus mampu menggerakkan masyarakat agar berartisipasi dan mempunyai kesadaran yang cukup tinggi dalam rangka membangun desanya.

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut tidak akan terlaksana dengan baik mana kala tidak dijunjung dari aparatnya dengan aparat. Dengan demikian kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Desa Pinang Sebatang Timur dulunya adalah Kampung Pinang Sebatang, namun karna terjadi pemekaran pada tahun 2002 maka Kampung Pinang Sebatang dibagi menjadi 3, yakni Kampung Pinang Sebatang,. Kampung Pinang Sebatang Timur dan Kampung Pinang Sebatang Barat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desa Pinang Sebatang Timur terletak di dalam wilayah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gasip Kecamatan Koto Gasip
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pinang Sebatang Kecamatan Tualang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pinang Sebatang Kecamatan Tualang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang

Luas wilayah Desa Pinang Sebatang Timur sekitar ± 38,16 KM Jarak dari ibukota Propinsi 65 KM,ditempuh dalam waktu 1,5 Jam, dan dari ibukota kabupaten 70 KM dari kota Kecamatan 11 KM dan berkedudukan di sebelah Timur Ibu Kota Kecamatan. Secara administratif Wilayah Kampung Pinang Sebatang Timur terbagi dalam 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun I Pertiwi, Dusun II Bunut dan Dusun III Indah, 6 (enam) Rukun Warga dan 24 (dua puluh empat) Rukun Tetangga. Desa Pinang Sebatang Timur secara geografisnya merupakan Tanah Datar dan Beriklim Tropis, temperatur suhu pada siang hari 31-32° C dan pada malam hari 20 – 22° C, Kelembapan 90 – 100 % dan rata – rata curah hujan berkisar 780 – 2461 mm/ Tahun.

Penduduk Desa Pinang Sebatang Timur berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang ada yaitu suku melayu, jawa, minang, batak, nias, dan ambon tapi dari banyak nya suku-suku dikampung ini tetap terjaga kerukunan dan karifan masyrakat. Desa Pinang Sebatang Timur dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Pinang Sebatang Timur mempunyai jumlah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penduduk 8.864 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 4.871 jiwa, perempuan 3.993 orang dan 2.596 KK, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.1 Jumlah Penduduk yang Tersebar di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 2018/2019

Dusun	Laki – Laki	Perempuan	Total KK
Dusun I Pertiwi	576	592	359 KK
Dusun II Bunut	2634	1916	1255 KK
Dusun III Indah	1661	1485	982 KK
Total	**4871**	**3993**	**2596 KK**

(Sumber Data APBDes Desa Pinang Sebatang Timur2018/ 2019)

Dengan penjelasan di atas sangat terlihat bahwa sangat pentingnya peran kepala desa dalam pembangunan desa yang dipimpimpinnya menuju kesejahteraan masyarakat desa maupun desa itu sendiri. Salah satu desa yang sedang melakukan pembangunan namun terindikasi tidak terlaksana dengan baik adalah Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Desa Pinang Sebatang Timur ini dikepalai oleh kepala desa Heri Suparjan, S.E

Infrastruktur fisik atau pembangunan fisik sangatlah penting bagi perkembangan masyarakat dan desa itu sendiri. Untuk itu Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang sedang berusaha membangun berbagai macam pembangunan fisik dan telah direncanakan dalam program rencana kerja pembangunan desa. Dalam rangka memaksimalkan pembangunan Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa melaksanakan Kewenangan Kepada Desa adalah melaksanakan koordinasi pembangunan secara partisipatif dengan berbagai instansi, atau lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa.

Selanjutnya koordinasi dilakukan oleh Kepala Desa dengan berbagai instansi atau lembaga-lembaga kemasyarakatan agar pembangunan lebih lebih cepat sasaran.

Pelaksanaan koordinasi dalam suatu organisasi merupakan tugas dari pimpinan organisasi, hal ini sebagaimana dikatakan oleh farlan (dalam handayaningrat, 1991:89) bahwa organisasi adalah suatu proses dimana pimpinann mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara para bawahannya dan menjamin kesatuan didalam pencapaian tujuan bersama.

Dari sekian banyak pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa pinang sebatang timur bersumber dari bantuan dana pemerintah dan masyarakat sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemenrintah.
2. Pendapatan Asli Desa (PAD) dari Sumber Kekayaan Desa
3. Swadaya Masyarakat/ Partisipasi Aktif Masyakarat

Dapat penulis gambaran bahwa dari ketiga Sumbar Dana tersebut diatas dirumuskan didalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) yang kemudian menjadi Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDes) dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bila dikaitkan pengertian diatas dan dikaitkan dengan sejumlah program pembangunan. Prinsip keterangan tahun tugas akhir di Desa pinang sebatang timur sebagaimana data tabel berikut:

Tabel I.2 Anggaran dan Belanja Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dari Tahun 2018/2019

No	Jenis kegiatan	Biaya	Sumber Dana
1	Pembuatan Drainase Batu Bata gg. Rukun	RP.163,838,500.00	Alokasi Dana Desa
2	Pembuatan Drainase JL. Pertiwi RT. 004 RW. 004 Dusun II Bunut	RP.131,467,600.00	Alokasi Dana Desa
3	Semenisasi gg. Sepakat RT. 001 RW. 002 Dusun Pertiwi	Rp. 93,357,375.00	Alokasi Dana Desa
4			

(Sumber Data APBDes Desa Pinang Sebatang Timur 2018/2019)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel I.3 Rincian Biaya ADD Tahun 2018/2019 Pembuatan Drainase Batu Bata gg.Rukun di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang.

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN + PPN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6 =3 X 5
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**				
1	Papan Nama Kegiatan	1.00	Bh	Rp. 330.000,00	Rp.330,000.00
II	**BAHAN-BAHAN**				
1	Kerikil	22.00	M^3	Rp. 302,500.00	Rp. 6,655,000.00
2	Pasir Cor	14.00	M^3	Rp. 275,000.00	Rp. 3,350,000.00
3	Pasir Pasang	30.00	M^3	Rp. 247,500.00	Rp. 7,425,000.00
4	Semen @50 Kg	322.00	Sak	Rp. 71,500.00	Rp. 23,023000.00
5	Batu Bata	25,500.00	Bh	Rp. 550.00	Rp. 14,025,000.00
6	Besi Beton dia 8mm	740.00	Btg	Rp. 42,900.00	Rp. 31,746,000.00
7	Besi Beton dia 6mm	571.00	Btg	Rp. 30,800.00	Rp. 17,586,800.00
8	Kawat Beton	75.00	Kg	Rp. 18,700.00	Rp. 1,402,500.00
9	Paku	130.00	Kg	Rp. 19,900.00	Rp. 2,574,000.00
10	Kayu Papan Kelas III	8.00	M^3	Rp.1,980.000.00	Rp. 15,840,000.00
11	Kayu Cerucuk Dia 8 – 10 cm	562.00	Btg	Rp. 11,000.00	Rp. 6,182,000.00
					RP.130,309,300.00
III	**UPAH TENAGA KERJA**				
1	Mandor	1.00	29 HK	Rp. 127,200.00	Rp. 3,688,800.00
2	Kepala Tukang	2.00	29 HK	Rp. 127,200.00	Rp. 7,377,600.00
3	Tukang	3.00	29 HK	Rp. 116,600.00	Rp. 6,762,800.00
4	Pekerja	4.00	29 HK	Rp. 106,000.00	Rp.15,370,000.00
					Rp. 33,199,200.00
				JUMLAH	**Rp.163,838,500.00**
TERBILANG : ***Seratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah***					

(Sumber Data APBDes Desa Pinang Sebatang Timur 2018/2019)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel I.4 Rincian Biaya ADD Tahun 2018/2019 Pembuatan Semenisasi GG. Sepakat RT. 001 RW. 002 Dusun Pertiwi di Desa Pinang Sebatang Timur

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN + PPN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1		2	3	4	5 = 2 x 4
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**				
1	Papan Nama Kegiatan	1.00	Bh	Rp. 330,000.00	Rp. 330,000.00
II	**BAHAN-BAHAN**				
1	Pasir Cor	30,00	M^3	Rp. 275.000,00	Rp. 8.250.000,00
2	Semen Pc @ 50 Kg	325,00	Sak	Rp. 71.500,00	Rp.23.237.500,00
3	Kerikil	43,00	M^3	Rp. 330.000,00	Rp.14.190.000,00
4	Paku	15,00	Kg	Rp. 18.700,00	Rp. 280.500,00
5	Wire Mesh	42,00	Lbr	Rp. 420.000,00	Rp.17.640.000,00
6	Kayu Papan Kelas III	2,00	M^3	Rp.1.980.000,00	Rp. 3.960.000,00
7	Plastik Alas Hitam	416,00	M^3	Rp. 5.500,00	Rp. 2.289.375,00
8	Aspal @ 200 Kg	300	Drum	Rp.3.300.000,00	Rp. 9.900.000,00
9	Kayu Bakar	4,00	M^3	Rp. 275.000,00	Rp. 1.100.000,00
10	Tanah Timbunan	23,00	M^3	Rp. 88.000,00	Rp. 2.024.000,00
					Rp.82.871.375,00
III	**UPAH TENAGA KERJA**				
1	Mandor	1,00	10 HK	Rp. 127.200,00	Rp. 1.272.000,00
2	Kepala Tukang	1,00	10 HK	Rp. 127.200,00	Rp. 1.272.000,00
3	Tukang	2,00	10 HK	Rp. 116.600,00	Rp. 2.332.000,00
4	Pekerja	3,00	10 HK	Rp. 106.000,00	Rp. 3.056.000,00
					Rp. 8.056.000,00
IV	**SEWA PERALATAN**				
1	Concrete Mixer	1,00	7 HK	Rp. 300.000,00	Rp. 2.100.000,00
				JUMLAH	**Rp.93.357.375,00**
TERBILANG : Sembilan Puluh Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ratus Rupiah					

(Sumber Data APBDes Desa Pinang Sebatang Timur 2018/2019)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel I.5 Rincian Biaya ADD Tahun 2018/2019 Pembuatan Drainase Jl. Pertiwi RT. 004 RW. 004 Dusun II Bunut di Desa Pinang Sebatang Timur

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN + PPN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
I	**PEKERJAAN PENDAHULUAN**				
1	Papan Nama Kegiatan	1.00	Bh	Rp. 330.000,00	Rp. 330.000,00
II	**BAHAN-BAHAN**				
1	Kerikil	36.00	M^3	Rp. 330.000,00	Rp. 11.880.000,00
2	Pasir Cor	25.00	Sak	Rp. 275.000,00	Rp. 6.875.000,00
3	Semen @50 Kg	314.00	M^3	Rp. 71.500,00	Rp. 22.451.000,00
4	Besi Beton dia 10 mm	272.00	Btg	Rp. 80.400,00	Rp. 21.868.800,00
5	Besi Beton dia 8 mm	271.00	Btg	Rp. 54.000,00	Rp. 14.634.000,00
6	Kawat Beton	66.00	Kg	Rp. 22.000,00	Rp. 1.452.000,00
7	Paku	120.00	Kg	Rp. 18.700,00	Rp. 2.244.000,00
8	Kayu Kelas III	10.00	M^3	Rp.1.980.000,00	Rp. 19.800.000,00
9	Triplek 6 mm	24.00	Lbr	Rp. 104.500,00	Rp. 2.508.000,00
10	Kayu Cerucuk Dia 8 – 10 cm	210.00	Btg	Rp. 11.000,00	Rp. 2.310.800,00
					Rp.106.022.800,00
III	**UPAH TENAGA KERJA**				
1	Mandor	1.00	21 HK	Rp. 127.200,00	Rp. 2.671.200,00
2	Kepala Tukang	2.00	21 HK	Rp. 127.200,00	Rp. 5.342.400,00
3	Tukang	3.00	21 HK	Rp. 116.600,00	Rp. 4.897.200,00
4	Pekerja	4.00	21 HK	Rp. 106.000,00	Rp. 8.904.000,00
IV	**SEWA PERALATAN**				
	Concrete Mixer	1	11 HK	Rp. 300.000,00	Rp. 3.300.000,00
				JUMLAH	**Rp.131.467.600,00**
TERBILANG: Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah					

(Sumber Data APBDes Desa Pinang Sebatang Timur 2018/2019)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bantuan Langsung ADD yang tertera dalam Tabel I.2, Tabel I,3, dan Tabel I,4 diatas adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan ada administrasinya pengelolaannya dilakukan dan di pertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan fisik di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebagian besar dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) di proyek pembangunan fisik. Meskipun beberpa pembangunan fisik sudah dilaksanakan di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, namun hasilnya belum optimal.

Pembangunan pedesaan adalah bagian dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional sebagai upaya untuk mencapai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dankualitas hidup masyarakat. Idealnya, program-program pembangunan perdesaan bisa dilakukakn secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan di wilayah setempat. Pelaksanaan program pembangunan perdesaan ini sangat pentingdalam kontek pembangunan nasional karena wilayah perdesaan menempati porsi terbesar di seluruh negara. Oleh karena itu, pembangunan perdesaan perlu ditingkatkan, terutama sejak era reformasi yang ditandai dengan penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis masyarakat sehingga masyarakat yang berada didaerah-daerah pnggiran menjadi semakin mandiri dalam mambangun lingkungan di daerahnya masing-masing. Pada intinya pembangunan merupakan salah satu bagian dari program pemberdayaan masyarakat di daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukan koordinasi dan kesungguhan dari aparat dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan menggerakan masyarakat untuk serta berperan dalam merencanakan, melaksanakan, merealisasikan dan mengawasi kegiatan pembangunan sarana umum Desa. Namun hal itu tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh masyarakat seutuhnya karena berbagai kelemahan-kelemahan dijumpai dilapangan, ditmbah lagi adanya kecenderungan perbedaan dan penafsiran dalam melihat suatu kebijakan akhirnya akan menunjukan belum tercermin kompetensi dalam menyelenggarakan sepenuhnya roda pemerintahan secara maksimal.

Koordinasi adalah usaha sistematis yang mengusahakan keselarasan, keseimbangan antara pekerjaan seseorang dengan orang lain, antara bagian satu dengan bagian yang lain. Sehingga diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran, ketidaktepatan dalam bekerja bersama-sama. Hal ini memungkinkan terjadinya efektivitas dalam sebuah pekerjaan. Koordinasi antar bagian di dalam organisasi bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang, kekacauan, percekcokan dan berbagai masalah lainnya yang tidak diharapkan. Itu lah pentingnya koordinasi dalam sebuah organisasi adalah untuk memanajemen dan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan dan keseimbangan antara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan yang lainnya di dalam organisasi tersebut.

Untuk membuat koordinasi dalam organisasi dapat berlangsung dengan baik. Maka dibutuhkan adanya pemberian wewenang yang sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Sehingga dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dapat menghindari kesimpangsiuran dan juga tumpang tindihnya tugas dan tanggung jawab di dalam satu bagian dan bagian yang lainnya dalam sebuah organisasi.

Dari pernyataan diatas masih ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan dalam pelekasanaan pembangunan fisik yang tentunya dibutuhkan kesiapan dalam menjalankan berbagai aktivitas pembangunan yang harus dipahami oleh aparat kecamatan dan desa dalam manjalankan fungsiya.

Dari penjelasan diatas ditemukan fenomena dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang tentunya dibutuhkan kesiapan dalam menjalankan aktivitas pembangunan yang dituntut mampu mengkoordinasikan perencanaan pembangunan agar kiranya dapat dilaksanakan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Adapun fenomena yang ditemukan di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah sebagai berikut,yaitu:

1. Kurangnya pertemuan resmi dari Kepala Desa untuk membicarakan masalah pembangunan fisik yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur.
2. Kurang dilibatkannya masyarakat dalam proyek pembangunan fisik desa sehingga kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan desa setempat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Hasil kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Pinang Sebatang Timur masih belum tepat pada sasarannya yang dibutuhkan sehingga diperlukannya pertemuan informal agar masyarakat bisa ikut serta dalam pembangunan fisik cepat terealisasi.
4. Kurangnya partisipasi dari tim atau pun organisasi yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Pinang Sebatang Timur.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukakan penelitian dengan judul **"Penyelenggaraan Koordinasi Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak."**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan **"Bagaimana Penyelenggaraan Koordinasi Pembangunan Fisik Secara Prtisipatif Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak."**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasrkan rumusan masalah di atas maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. **Tujuan penelitian**
   a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tugas Kepala Desa dalam mengkoordinasikan pembangunan fisik di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan tugas kepala desa dalam bidang kondisi pembangunan fisik di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan praktis, sebagai bahan masukan dan informasi bagi kepala desa untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat dalam pelaksanaan tugas kepala desa dalam bidang pembangunan di desa pinang sebatang timur kecamatan tualang kabupaten siak.

b. Kegunaan akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya dalam masalah yang sama di masa yang akan datang.

c. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan Ilmu Pemerintahan di masa yang akan datang seiring masyarakat yang semakin maju, kritis dan dinamis dalam berbagai aspek.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis mengutip beberapa pendapat para ahli dan teori yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk memudahkan penelitian untuk memecah permasalahan dan akan menjadi landasan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

1. Pengertian Ilmu Pemerintahan

Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk diwilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata "perintah" tersebut memiliki empat unsure yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut Ndraha (2003:6), pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dan kelompok. Menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (2003: 12), Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagaian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat.

Selanjutnya Ndraha menjelaskan (2003:7) bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal. Ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Lebih lanjutnya Ndraha (2003:7) menjelaskan ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga daapt diterima oleh yang bersangkutan saat dibutuhkan) dan kedua adalah sudut bagaimana seadanya (pada saat dibuthkan oleh yang yang bersangkutan, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik).

Inu Kencana Syafiie menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan (eksekutif), kepengurusan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemrtintahannya)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. (dalam syarifin dan dedah jubaedah 2006;73)

Ilmu pemerintahan menurut Hamidi (2010;134) adalah ilmu yang mempelajari cara melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam hubungan antara pusat dan daerah, antara lembaga, serta antara yang memerintah dan yang diperintah. Ilmu pemerintahan mempunyai objek material dan objek formal. Objek formal ilmu pmerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubungan pemerintahan dengan sub-subnya (hubungan antara pusat dan daerah, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, hubungan antara lembaga serta departemen), termasuk pembahasan *output* pemerintahan sebagai fungsi, sistem, aktivitas, kegiatan, gejala, perbuatan serta peristiwa elit pemerintahan yang berkuasa. (Hamidi,2010;134)

Selanjutnya Hamidi (2010;135) menjelaskan bahwa objek material ilmu pemrintahan sama dengan objek material ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum tata negara, dan ilmu negara itu sendiri yaitu Negara.

Menurut Munaf (2015; 202) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance)* itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis.

Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintahan dan Negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintahan dan Negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa illmu pemerintahan merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah di dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang di perintah dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur dan komponen dari suatu jabatan. Selanjutnya tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap Moekidjat (1998;11)

Sedangkan menurut Thoha (2011;76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, misi, suatu organisasi.

Thoha (2011;76) tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis. (Salam, 2007;34).

Montesquieu (Salam, 2007;35) pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang biasa dikenal dengan nama Trias Politika baik itu legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang).

Pemerintah menurut (Supriyanto, 2009 : 23) adalah badan atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka atau upaya mencapai tujuan negara.

Soedarmayanti (2004:9) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyatnya. Oleh karena itu tugas dari pemrintah adalah:

a. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Fungsi pemerintahan menurut Ryas Rasyid (dalam Ndraha, 2003;58) ada tiga fungsi, yaitu:

a. Pelayanan
b. Pemeberdayaan
c. Pembangunan

Pengertian pemerintahan dalam arti terluas adalah semua lembaga negara seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar (konstitusi) suatu negara, pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasann pemerintahan, hal ini terdapat misalnya di negara Indonesia dibawah Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan pemerintah meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang eksekutif saja (Ndraha, 2003;74).

Pemerintahan dan pemerintah menurut Muhammad Yamin memiliki arti yang berbeda. Pemerintah adalah jabatan atau aparatur dalam susunan politik. Sedangkan pemerintahan adalah tugas kewajiban alat negara. (dSyarifin dan Dedah Jubaedah, 2006;73).

Menurut Inu Kencana Syafiie (Syarifin dan Dedah Jubaedah,2006;72-73) Istilah pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Disebut sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material maupun formal, sifatnya universal, sistematis serta spesifik (khas) dan dikatakan sebagai seni, karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkait serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Taliziduhu Ndraha pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan wrga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya. (Awang dan Mendra Wijaya, 2012;6).

Talizidhu Draha dalam (Awang dan Mendra wijaya, 2012:7) juga menjelaskan bahwa pemerintah adalah alat pelengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

Ndraha (2003;5) menjelaskan bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.

Selanjutnya Ndraha (2005;141) juga mendefinisikan pemerintahan yaitu proses, cara, perbuatan pemerintah.

Taliziduhu Ndraha dalam (Hamidi, 2010;135) mengatakan bahwa pemerintahan dapat digolongkan menjadi 2 golongan besar yaitu pemerintahan konsentratif dan dekonsentratif.

Jo Ann G. Ewalt (dalam Awang dan Mendra Wijaya 2012;11) berpendapat bahwa pemerintahan adalah ketergantungan daya yang terlibat dalam hubungan antar lembaga yang juga terlibat dalam aksi kolektif. Organisasi tergantung pada satu sama lain untuk pencapaian tindakan kolektif dan dengan demikian harus ada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pertukaran sumber daya dan menegosiasikan pemehaman bersama tentang tujuan program utama(dari organisasi tersebut).

Menurut Rasyid (2002;14) secara umum tugas-tugas pokok pemerintah antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pembrontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah atau mengancam integrasi negara melalui cara-cara kekerasan.
b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap wrga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakang keberadaan mereka.
d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah atau yang akan lebih terlaksana.
e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
g. Menerapkan kebijakan untuk memeliahara sumber daya alam lingkungan hidup.

Soedarmayanti (2004;332) mejelaskan bahwa pemerintah dalam menjalankan fungsi harus dapat menciptakan *enviroment* dan mekanisme

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berpolitikan serta hukum dalam era desentralisasi secara kondusif. Fungsi pemerintah dalam paradigma baru lebih dapat memacu kemajuan seperti *steering*, fasilitasi, motivasi pemberdayaan, regulasi, *preventing* sebagai antisipasi dalam lingkup pendayagunaan aparatur negara.

Menurut Devey (Wasistiono dan Irwan Tahir,2007;53) pemerintah seacara umum mempunyai fungsi-fungsi:

a. Penyedian pelayanan
b. Pengaturan
c. Perwakilan
d. Koordinasi dan perencanaan

Sejalan dengan pendapat Devey, Bertrand (Wasistiono dan Irwan Tahir, 2007;53) mengemukakan pendapat empat fungsi pemerintahan, yaitu:

a. Membuat hukum
b. Menegakan hukum
c. Pelayanan publik
d. Pendorong perubahan sosial

Sedangkan menurut Stanley (Wasistiono dan Irwan Thair, 2007;53) ada tiga kategori utama fungsi pemerintahan, yaitu:

a. Menciptakan landasan fisik dan sosial bagi pembangunan
b. Menciptakan rencan pembangunan yang menyeluruh dan terpadu
c. Menghasilkan produktif dan distribusi barang dan jasa yang lebih banyak dan efisien.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Konsep Manajemen pemerintahan

Manajemen merupakan suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan berbagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan manajerial melalui kegiatan-kegiatan orang lain (Siagian, 2003;5).

Menurut Stoner manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (Zulkifli dan Moris, 2014:17).

Menurut R Terry manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planing, organizing, actuiting, dan controling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula (Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Menurut The liang gie manajemen suatu konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai (Zulkifli dan Moris, 2014:18).

Menurut Munandar (2014:1) Manajemen berarti proses mengoordinasi kegiatan atau aktivitas kerja sehingga dapat diselesaikan secara efisien serta efektif dengan melalui orang lain. Selain efisien dan efektif, mengoordinasikan pekerjaan orang lain merupakan hal yang membedakan posisi manajerial dan non-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

manajerial. Namun demikin ada aturan yang mendasarinya, sehingga seorang manajer tidak bisa semaunya melakukan apa yang diinginkannya setiap saat atau setiap tempat.

Sedangkan manajemen menurut Siagian, (2003; 5) dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang untuk menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Sementara itu Terry mendefinisikan konsep manajemen sebagai konsep yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating, controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuanatau keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan semula (Sarwoto, 1983; 46).

Manajemen di definisikan menurut Marry, ia mengemukakan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain (dalam Sabardi, 2001; 3).

Sejalan dengan itu juga Terry mengemukan bahwa manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya (dalam Sabardi, 2001; 2).

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : *men, money, methode, materials, machines,* dan *market.*

Unsur *men* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management.* Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia *(personnel management).*

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada manajemen. Sering orang mengatakan bahwa, kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Memang demikian halnya karena kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang, bahan-bahan, mesin-mesin, metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien dan efektif.

Menurut The Liang Gie manajemen administrasi adalah segenap aktivitas yang bersangkut paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Manulang, 2006:8).

Menurut Sondang (2003;5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggara berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan.

4. Konsep Pembangunan

Pembangunan adalah kata yang digunakan secara meluas dalam semua media massa di seluruh dunia dan merupakan konsep yang kerap kali disebut dan diperbincangkan oleh semua lapisan masyarakat, terutama di kalangan ahli politik, wartawan, orang pemerintah, dan lain-lain.Pembangunan itu sendiri berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi syarat utama pembangunan.

Menurut Johan Galtung (2015;1) pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

Joko Untoro (2015;1) juga memberikan pendapatnya bahwa pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapat perkapita.

Menurut roger dan shoemaker (1971;45) pembangunan pembangunan adalah jenis perubahan sosial dengan ide-ide baru untuk kehidupan sosial dengan tujuan untuk memproleh pendapatan yang lebih tinggi dan memberikan tingkat kehidupan yang lebih tinngi pula melalui organisasi yang baik. Konsepsi pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubungkan dengan aspek-aspek soesial. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hal membuktikan keberhasilan. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial *(social capital)* juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian *natural capital* juga sangat diperhatikan demi kepentingan manusia. Dari semua itu, yang terpenting pengmbilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan *(moral hazard)* yang dipenuhi kepentingan tertentu *(vested interest)* dari keuntungan semata *(rent seeking)*.

Demikianlah hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi (menembus) batas ruang *(inter-region)* dan waktu *(inter-generation).* Impikasinya kajian aspek sosial menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik yang telah dilukiskan di atas (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004;19).

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negarauntuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochman Dahuri, 2004;21).

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada stau kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembagunan sebagai "suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembina bangsa *(nation building)*. Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui uapaya yang dilakukan secara terencana.

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005)

5. Konsep Pemerintah Desa

Menurut Soetardjo dan Yuliati (Wasistiono dan Irwan Tahir, 2007;7) desa bersal dari bahasa India yakni *swadesi* yang berarti tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat." (Widjaja,2003:3).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Nurcholis (2011;73) penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari:

a. Unsur pimpinan yaitu kepala Desa
b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:
   i. Sekertaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh skertaris desa
   ii. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan sperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain
   iii. Unsur kewilayaan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun

Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri atas skertaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekertaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (2011;76).

Nurcholis (2011;76) mengatakan sekrtaris desa diangkat oleh skertaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/ walikota. Adapun perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan.

Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa (Nurcholis, 2011;77).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1979 desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah lansung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1, 2, 3, dan 4 terdapat beberapa penjelasan tentang Desa yaitu:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa massyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republk Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepela Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Selanjutnya pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan pengaturan desa. Dimana pengaturan desa itu bertujuan untuk:

a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efesien, efektif, terbuka serta bertanggungjawab;
f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;dan
i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 12 dijelaskan bahwa:

1. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 terdiri kepala desa dan perangkat desa;
2. Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa lainnya
   a. Sekertaris desa
   b. Pelaksanaan teknis lapanganan
   c. Unsur kewilayahan
3. Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas;
4. Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kebutuhandan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
5. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

6. Konsep Pembangunan Desa

Sebagaimana dikemukakan di atas, pembangunan adalah Merupakan proses perubahan yang disengaja dan direncanakan lebih lengkap lagi, pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau di rencanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah yang dikehendaki.

Istilah pembangunan umum-nya dipadamkan dengan istilah *developmen*, sekalipun istilah *developmen* sebenarnya berarti perkembangan tanpa perencanaan. Maka pembangunan masyarakat desa juga disebut *rurar*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

developmen. Demikian pula istilah modemisasi juga sering diartikan identik dengan pembangunan, yakni mengingat artinya sebagai proses penerapan pengetahuan dan teknologi modem pada berbagai segi atau bidang kehidupan masyarakat. Sehingga, ada pula yang mendefinisikan pcmbangunan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan. Perubahan sosial melalui modemisasi.

Didalam pembangunan masyarakat desa masih terdapat masalah yang sangat relevan dibahas karena perkembangan pembangunan hanya berkecipung di daerah perkotaan sementara secara umum Negara kita Indonesia masih didominasi oleh pedesaan. Walaupun pada masa pemerintahan Orde Baru merencanakan berbagai upaya kebijaksanaan dan program pembangunan pedesaan, tetapi secara riil dapat kita lihat bahwa kondisi social ekonomi masayarakat pedesaan masih sangat jauh dari yang diharapkan (memperihatinkan).

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat desa sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah dan perkembangan pembangunan masyarakat pedesaan tidak hanya semata-mata pada sector pertanian, distribusi barang dan jasa tetapi lebih kepada spectrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuahan segenap anggota masyarakat sehingga mereka lebih bisa mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan terlepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara. Sementara itu, pembangunan juga perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik sehingga dapat tercapai tujuan dari ruang lingkup pembangunan pendesaan yang sangat luas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya yang deteliti oleh *Elviza* dengan judul *"Evaluasi Pelekasanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar"* ialah lokasi penelitiannya, dimana penulis meneliti di Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan peneliti sebelumnya meneliti di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Kemudian konsep yang penulis gunakan ialah Konsep Tugas dari (Mathis dan John H. Jackson, 2004;237), sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan Konsep Evaluasi dari (Wirawan, 2011;7). Selain itu yang membedakan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu rumusan masalah, disini penulis membahas pembangunan fisik drainase dan semenisasi. Sedangkan peneliti sebelumnya lebih membahan sosialisasi pembangunan infrastruktur, seperti keefektivitasnya dan dampaknya yang membedakannya lagi adalah tipe penelitian yang penulis gunakan, karena penulis menggunakan tipe penelitian Kualitatif sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan tipe penelitian Kuantitatif.

7. Konsep Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas yang sudah disusun sedemikian rupa dan telah memiliki kejelasan mekanisme dan prosedur kerja tidak akan berarti apa-apa bagi organisasi jika tidak bertujuan untuk memenuhi kepentingan publik atau masyarakat. Dalam melaksanakan kepentingan masyarakat tersebut tentunya pelaksanaan tugas harus dilakukan oleh aperatur yang menguasai bidang dan tugas yang diselenggarakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Siagian (2001;126) pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.

Uraian tugas adalah merupakandaftar kegiatan atau tugas yang harus dilakukan oleh setiap pegawai dalam organisasi sesuai dengan pekerjaan yang bersangkutan. (Soekidjo,2009;141).

Menurut Mathis dan Jhon H. Jackson (2004;237) tugas adalah aktivitas pekerjaan yang khusus dan dapat diindentifikasi terdiri dari gerakan-gerakan.

Kansil (2003;189) Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggarakan dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengatrunnya, yaitu:

a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggung jawabsetiap aparatur yang terlibat
c. Prinsip koordinasi
d. Dikomunikasikan/ tidak terbelit-belit

8. Konsep Partisipatif

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok maupun masyarakat untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Partisipasi dapat di defenisikan sebagai keterlibatan mental/ fikiran dan emosi/ perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Partisipasi adalah hal ikut sertanya setiap orang suatu kegiatan Merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Masyarakat dalam kedudukannya sebagai subjek pembangunan ditutut dalam memberikan sumbangan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kesediaan memberikan sumbangan ini bukan lahir begitu saja, akan tetapi terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu yang di capai. Disamping juga adanya upaya-upaya yang kita lakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan adalah fungsi pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh S.P Siagian bahwa:

"Pergerakan adalah merupakan keseluruhan dari proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien serta ekonomis.". (S.P Siagian:99).

Pemerintah diharapkan dapat melakukan pendekatan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Suatu hal yang perlu diingat bahwa masyarakat tidak merasa memiliki apabila dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut, mereka diikut sertakan. Selain itu dalam menyusun program pembangunan, maka haruslah melibatkan masyarakat, karena sangat susah apabila dalam pelaksanaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

program pembangunan perencanaannya tidak melibatkan masyarakat. Jadi pemerintah harus bersama-sama masyarakat dalam penyusunan suatu rencana program pembangunan sampai pada pelaksanaannya. Dengan demikian, dapat dipahami pentingnya partisipasi untuk menggerakkan masyarakat dalam suatu rencana program pembangunan pencapaian sasaran yang diinginkan.

Diperlukan upaya untuk lebih meyakinkan masyarakat partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini mennjukkan betapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi. Adapun pengertian partisipasi adalah sebagai berikut:

"Partisipasi adalah sebagai ketersediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri". (Santoso sastropoetra 1986:3).

Jenis-jenis dan bentuk-bentuk partisipasi antara lain:

a. Partisipasi dengan pemikiran (Psicological Partisipation)
b. Partisipasi dengan tenaga (Physical partisipation)
c. Partisipasi dengan pikiran dan tenaga atau partisipasi aktif (Aktif Partisipation)
d. Partisipasi dengan keahlian(With Skill partisipation)
e. Partisipasi dengan barang (Material Partisipation)
f. Partisipasi dengan uang (Money Partisipation)
g. Partisipasi dengan jasa (Service Partisipation)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Bentuk konsultasi

i. Bentuk sumbangan spontan berupa barang atau jasa.

j. Bentuk sumbangan dari luar dalam bentuk proyek yang bersifat berdikari

k. Bentuk proyek yang dibiayai oleh komite setelah ada konsensus dalam rapat komniti

l. Bentuk sumbangan dalam bentuk kerja jasa

m. Bentuk aksi massal mengerjakan proyek secara sukarela

n. Bentuk mengadakan perjanjian bersama untuk bekerjasama melampaui suatu tujuan/ cita-cita

o. Bentuk melakukan pembangunan dalam lingkngan keluarga

p. Bentuk pembangunan proyek komuniti yang otonom.

Apabila jenis-jenis dan bentuk-bentuk partisipasi tersebut terus di tingkatkan secara terus menerus, maka segala program pembangunan yang di teteapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Hal ini jga memungkinkan terjadinya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.

Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu: pertama, partisipasi merupakan sebuah alat, dimana partisipasi dilihat sebagai sebuah teknik untuk membantu memajukan program desa atau disebut pembangunan partisipasi. Kedua, partisipasi sebagai sebuah tujuan itu sendiri yang dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang dipandang dari segi perolehan keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Menurut juliantara (2004:84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga Negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara lansung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.

Didalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebut boleh di katakan cukup baik, tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan.

Menurut Adisasmita (2006:38) partisipasi masyarakat dapat di defenisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.

Peningkatkan partisipasi masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemamfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi).
b) Aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan).
c) Aspek keluar atau output (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efesiensi).

Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengarkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat umum atau sebanyaknya orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagai "pengikutsertaan" atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama.

Menurut dwipayana (2003:81), partisipasi masyarakat menyangkut dua dimensi yakni keluar dan kedalam. Yang pertama, menyangkut partisipasi yang melibatkan pemerintah itu sediri dan kedua, menyangkut partsipasi warga desa terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi yang melibatkan pemerintahan itu sendiri adalah menyangkut seberapa besar keikut sertaan aparatur desa dalam pembangunan desa, hal ini dapat tercermin dari penegakan demokrasi, menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga adat maupun agama yang ada, pengelolaan konflik dan menciptakan masyarakat yang mendiri serta menjalankan pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebut pun boleh dikatakan cukup baik, tingkat ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat mensetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dapat memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama, budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat tersebut secara maksimal.

Menurut Tjokromidjojo (dalam safi'i, 2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

a) Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
b) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
c) Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral yang harus ditumbuh kembangkan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging), rasa tanggung jawab (sense of responbility) dari masyarakat secara sadar, bergairah dalam tanggung jawab (Tjokromidjojo,2002).

Dilihat dari pengamatan penulis ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Faktor-faktor tersebut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dapat bersifat positif maupun negatif. Faktor-faktor yang bisa menjadi daya pendorong agar masyarakat ikut berpartisipasi yaitu:

a) Partisipasi dilakukan melalui usaha penerapan demokrasi artinya masyarakat desa diberikan kesempatan memilih dan memutuskan apa yang dikehendaki baik di antara alternatif pemerintah maupun maupun dari allternatif masyarakat itu sendiri.
b) Partisipasi itu dilakukan dalam organisasi yang sudah dikenal atau sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
c) Partisipasi dilakukan dalam upaya perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa.
d) Setiap keputusan masyarakat, sepanjang mengenai kepentingan mereka harus dihormati dan diakui.

Partisipasi masyarakat menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok dalam hal pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut:

Menurut Taliziduhu Ndraha ada beberapa wadah bagi terwujunya partisipasi masyarakat, sebagai berikut:

1) Partisipasi bentuk ide/ pikiran (yang diberikan dalam rapat), rapat yang dimaksud rapat mingguan di desa, seminar, penataran-penataran.
2) Partisipasi bentuk fisik/tenaga yang diberikan dalam perbaikan pembangunan agar partisipasi tenaga merupakan pendorong, perlu di usahakan penertiban, penjelasan-penjelasan tentang manfaat. Dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

partisipasi ini banyak hal yang di dapat antara lain bangkitnya rasa berlomba dan rasa tanggung jawab.

3) Partisipasi bentuk materi/ barang, dikalangan masyarakat masih hidup kesediaan memberi harta benda terhadap usaha yang dirasakan meringankan beban hidup mereka seperti perbaikan kondisi jalan, sumbangan ronda malam.

4) Partisipasi bentuk dana/ uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

9. Konsep Koordinasi

Penggunaan istilah koordinasi sering dipertukarkan atau dilakukan secara bergantian dengan istilah kerja sama (cooperation), padahal koordinasi lebih dari sekedar kerjasama, karena dalam koordinasi juga terkandung sinkronisasi. Sementara kerjasama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian kerjasama dapat terjadi tanpa koordinasi, sedangkan dalam koordinasi pasti ada upaya untuk menciptakan kerjasama.

Koordinasi atau dalam bahasa inggris *coordination*, berasal dari bahasa latin yakni Cuma yang berarti berbeda-beda dan ordinare yang berarti penyususnan atau penempatan sesuatu pada seharusnya (Westra dalam Mulyasa,2002;131).

Pelaksanaan koordinasi dalam suatu organisasi merupakan tugas dari pemimpin organisasi, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Farlan (dalam Handayaningrat,1991;89) bahwa koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara para bawahannya dan menjamin kesatuan didalam pencapaian tujuan bersama.Maka dari itu dapat bertujuan untuk:

a. Mengadakan pertemuan resmi yaitu melakukan rapat antara Kepala Desa dengan instansi terkait maupun lembaga kemasyarakatan untuk membahas pembangunan fisik tersebut.
b. Adanya kerjasama yaitu meningkatkan kerjasama antara Kepala Desa dengan instansi terkait maupun lembaga kemasyarakatan dalam menciptakan kerjasama yang baik.
c. Mengadakan pertemuan informal yaitu kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan fisik juga harus mengadakan pertemuan informal dengan masyarakat untuk membahas pembangunan yang ada di desa tersebut.
d. Mengangkat suatu tim adalah upaya menyelenggarakan pembangunan, kepala desa berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membentuk suatu tim guna memperlancar pembangunan fisik secara efesien.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat dilihat suatu gambaran bahwa koordinasi adalah suatu kegiatan untuk menyatu padukan dan menyelaraskan berbagai pihak yang terkait dalam suatau kegiatan, sehingga nantinya terdapat kesamaan sikap, pandangan maupun tindakan yang dilakukan dalam aktifitas pencapaian tujuan.

Menurut G.R Terry (dalam Melayu,2001;85) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Koordinator harus dilakukan oleh setiap pimpinan dalam suatu organisasi, artinya harus dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai bawahan. Koordinasi tidak dapat diperintahkan, tetapi akan lebih baik dengan secara persuasif (permintaan dan permohonan) kepada bawahan. Adapun cara-cara pimpinan mengadakan koordinasi dengan bawahan yang menurut Melayu (2001;88) adalah:

1. Memberikan keterangan langsung dengan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik
2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri, tujuannya itu adalah tujuan bersama
3. Mendorong anggota bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran dan lain sebagainya
4. Mendorong para anggota berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran
5. Membina human relations yang baik antara sesama karyawan
6. Manejer sering melakukan komunikasi informasi dengan para bawahan, ringkasnya suatu koordinasi akan lebih baik jika diperoleh dukungan, partisipasi dari bawahan dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pkerjaan diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan, supaya mereka antusias dalam melaksanakannya

Menurut Nitisemito (1985:121) Koordinasi adalah tindakan seseorang manejer/ pemimpin untuk mengusahakan terjadinya keselarasan antara pekerjaan yang dilakukan oleh seorang/bagian yang satu dengan yang lainnya , sehingga diharapkan tidak terjadi kesimpangsiuran, ketidaktepatan, serta doubel pekerjaan antara yang satu dengan yang lainnya.

Sedangkan menurut Syarifudin (1985:121) Koordinasi adalah salah satu proses rangkaian kegiatan bertujuan membentuk,menyelaraskan tiap-tiap langkah dan kegiatan organisasi agar sasaran dapat tercapai.

Untuk tetap terlaksananya koordinasi pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, maka menurut Siagian (dalam Mulyasa, 2002:137) perlu melakukan cara-cara untuk mewujudkan koordinasi yang baik, yakni:

a. Memberikan pedoman
b. Memberikan bimbingan
c. Memberikan arahan
d. Memberikan supervisi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1: Kerangka pikir dari penelitian tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pembangunan Secara Partisipastif di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

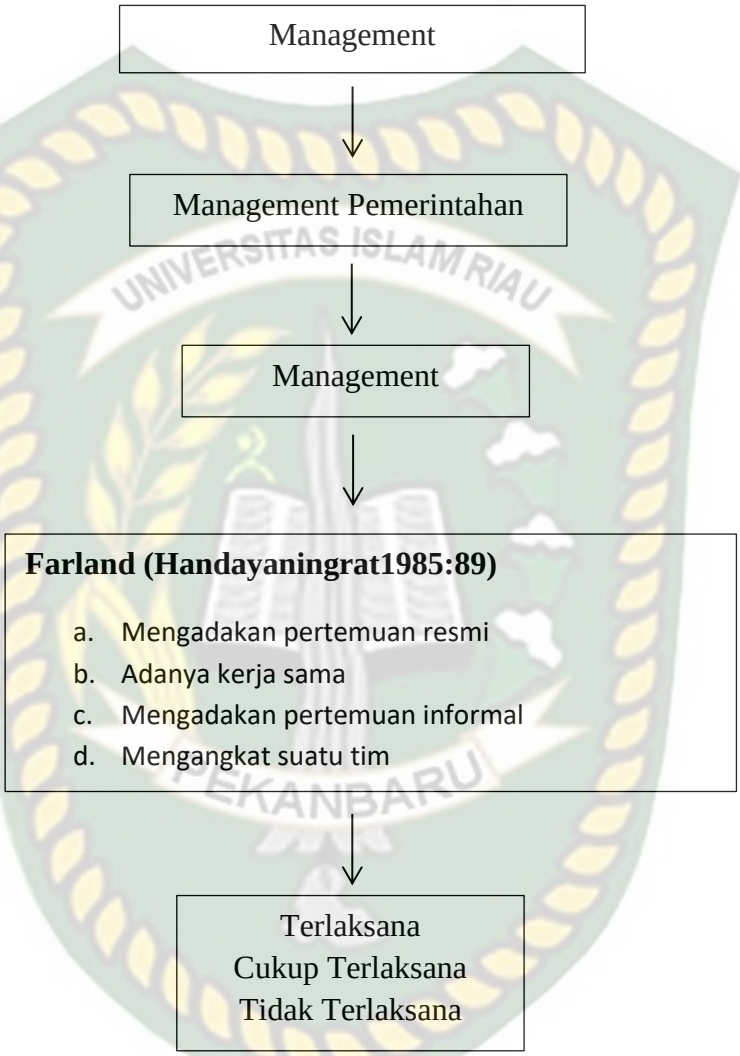

Sumber:Modifikasi Penelitian Tahun 2019

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas dihubungkan landasan teori yang ada maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan tugas kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan Desa Pinang Sebatang Timur secara partisipatif pemerintahan tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dengan mekanisme yang tepat serta koordinasi yang maksimal sesuai dengan indikator pengukuran yang dipakai dalam penelitian ini, maka menghasilkan pelaksanaan tugas kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif yang efektif dan efesien sesuai dengan apa yang diharapkan oleh setiap aparatur daerah dan pemerintahan.

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran terhadap konsep yang digunakan, maka berikut ini akan dijelaskan masing-masing pengertian konsep operasionalnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri *(Self Sustaining Proces)* tergantung kepada manusia dan struktur sosial.
2. Tugas adalah suatu aktivitas pekerjaan yang khusus dan dapat diindentifikasi terdiri dari gerakan-gerakan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas yaitu: menyelenggarakan urusan pemerintah, menyelenggarakan urusan pembangunan, dan meneyelenggarakan urusan kemasyarakatan. Kepala Desa memeiliki wewenang antara lain: Membina kehidupan dan perekonomian masyarakat desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipasif. Kepala Desa memeiliki kewajiban antara lain: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan masyarakat dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kelembagaan di desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

4. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perangkat desa dalam penelitian ini adalah terdiri dari sekretaris desa, kaur umum, kaur keuangan, kaur pemerintahan, kaur pembangunan dan kepala desa.
6. Mengadakan pertemuan resmi yaitu melakukan rapat antara Kepala Desa dengan instansi terkait maupun lembaga kemasyarakatan untuk membahas pembangunan fisik tersebut.
7. Adanya kerjasama yaitu meningkatkan kerjasama antara Kepala Desa dengan instansi terkait maupun lembaga kemasyarakatan dalam menciptakan kerjasama yang baik.
8. Mengadakan pertemuan informal yaitu kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan fisik juga harus mengadakan pertemuan informal dengan masyarakat untuk membahas pembangunan yang ada di desa tersebut.
9. Mengangkat suatu tim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dalam upaya menyelenggarakan pembangunan, kepala desa berkoordinasi dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

instansi terkait untuk membentuk suatu tim guna memperlancar pembangunan fisik yang ada di Desa Pianang Sebatang Timur.

E. Operasi Variabel

Tabel II.1: Operasional Variabel Penelitian tentang "Penyelenggaraan Koordinasi Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak."

Konsep	Variabel	Indikator	Item Yang Dinilai
1. Koordinasi sebagai suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tidakan dalam mencapai tujuan bersama Farland dalam (Handayan ingrat1985:89)	Mengkoordinasikan upaya penyelenggara-an pembangunan secara partisipatsif	1. mengadakan pertemuan resmi	a. Mengadakan rapat atau musyawarah. b. Diadakannya pertukaran pikiran. c. Adanya kerjasama antar pihak.
		2. Adanya Kerjasama	a. Menentukan tugas b. Membuat pembagian kerja c. Melakukan koordinasi.
		3. Mengadakan pertemuan informal	a. Adanya dialog b. Adanya diskusi c. Adanya gagasan
		4. Mengangkat suatu tim	a. Adanya suatu tim kerja b. Adanya pembagian kerja c. Adanya tanggung jawab

Sumber : Modifikas Penulis 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian survey dimana dan data informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan dilapangan dan dijadikan dasar untuk menggambarkan setiap indicator dan menggali lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian, dengan Metode Kualitatif karena Kulitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Sugiyono (2009;1)

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Alasan penulis memilih Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang adalah karena penullis menemukan fenomena indikasi pembangunan yang tidak terlaksana didesa tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti di Desa Pinang Sebatang Timur ini.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Menurut Bungin (2009:108) informan adalah orang yang diwawancarai atau diminta informan oleh para pewawancara artinya orang yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dianggap menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Sedangkan informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Adapun penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling,* dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan lainnya adalah bahwa jumlah sampel yang diambil dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian serta sampel yang sudah memberikan jawaban penelitian.

Hal yang dilakukan sesuai dengan pendapat Liclon dan Guba dalam Sugiyono (2012:54) bahwa ciri-ciri khusus teknik *purposive sampling* adalah:

1. *Emergent sampling design;* bersifat sementara, sebagai pedoman awal terjun ke lapangan, setelah sampai ke lapangan boleh saja berubah sesuai dengan keadaan.
2. *Serial selection of sample units;* menggelinding sperti bola salju (snow ball); sesuai dengan petunjuk yang didapatkan dari informan-informan yang telah diwawancarai.
3. *Continous adjustment or 'focusing' of the sample;* siapa yang akan dikejar sebagai informan baru disesuaikan dengan petunjuk informan sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, unit informan yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan terarahnya focus penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. *Selection to the point of rendundancy;* pengembangan informan dilakukan terus sampai informan mengarah ke titik jenuh.

Adapun yang menjadi Informan Peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa
2. Sekertaris Desa
3. Kaur Pembangunan
4. Ketua LPM
5. Ketua RT
6. Ketua RW
7. Ketua Karang Taruna
8. Ketua PKK
9. Tokoh Masyarakat
10. Kepala Dusun

D. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kulitatif yang menjadi instrument atau alat peneliti adalah Responden. Oleh karen itu peneliti sebagai instrumen juga harus di validasi seberapa jauh peneliti kulitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan, sehingga peneliti merupakan *key instrument.*

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012:60) mengatakan bahwa dalam penelitian kulitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadi manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasanya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharpkan, itu semuanya tidak dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para responden yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan sudah tertulis dalam bentuk dokumentasi dan terkadang juga diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. data ini merupakan data yang sudah diolah badan-badan tertentu. Data yang dpergunakan sepanjang memiliki kaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:
    a. Data tentang keadaan geografis
    b. Data tentang keadaan penduduk
    c. Data tentang keadaan ekonomi dan data lainnya

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang atau tersamar, yaitu menyatakan terus terang kepada informan bahwa penulis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sedang melakukan penelitian. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan penulis juga tidak terus terang atau tersamar dalam melakukan observasi dengan pertimbangan untuk menghindari jika tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Pinang Seabatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang bersifat rahasia atau yang masih dirahasiakan.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yaitu wawancara di lakukan beberapa kali terhadap informan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Adapun cara melakukan wawancara ini yaitu dengan wawancara terbuka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis data yang diperoleh penulis baik itu data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini dilakukan analisis data secara kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kuisioner kualitatif dan wawancara lebih mendalam dengan responden. Data yang diperoleh dari kuisioner dan wawancara mendalam dikumpulkan kemudian dikelompokan menurut jenis dan kegunaanya sehingga data tersebut dapat diolah dan dianalisa menggunakan landasan teori yang erat hubungannya dengan masalah penelitian ini dapat ditarik kesimpulan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2. Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pembangunn Fisik Secara Partisipatif Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Jenis Kegiatan	2018-2019																							
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Up																								
2	Seminar Up																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisioner																								
5	Rekomendasi survey																								
6	Survey lapangan																								
7	Analisis data																								
8	Penyusunan hasil penelitian																								
9	Konsultasi revisi skripsi																								
10	Ujian komprehensif																								
11	Revisi skripsi																								
12	Penggandaan skripsi																								

Sumber : Modifikasih Penulis 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Desa Pinang Sebatang Timur

1. Sejarah Kampung

Kampung Pinang Sebatang Timur dulunya adalah Kampung Pinang Sebatang , namun karna terjadi pemekaran pada tahun 2002 maka Kampung Pinang Sebatang dibagi menjadi 3 , yakni Kampung Pinang Sebatang,. Kampung Pinang Sebatang Timur dan Kampung Pinang Sebatang Barat.

2. Demografi

Kampung Pinang Sebatang Timur terletak di dalam wilayah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gasip Kecamatan Koto Gasip
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pinang Sebatang Kecamatan Tualang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pinang Sebatang Kecamatan Tualang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang

Luas wilayah Kampung Pinang Sebatang Timur sekitar ± 38,16 KM Jarak dari ibukota Propinsi 65 KM,ditempuh dalam waktu 1,5 Jam, dan dari ibukota kabupaten 70 KM dari kota Kecamatan 11 KM dan berkedudukan di sebelah Timur Ibu Kota Kecamatan. Secara administratif Wilayah Kampung Pinang Sebatang Timur terbagi dalam 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun I Pertiwi, Dusun II Bunut dan Dusun III Indah, 6 (enam) Rukun Warga dan 24 (dua puluh empat) Rukun Tetangga. Kampung Pinang Sebatang Timur secara geografisnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan Tanah Datar dan Beriklim Tropis, temperatur suhu pada siang hari 31-32° C dan pada malam hari 20 – 22° C, Kelembapan 90 – 100 % dan rata – rata curah hujan berkisar 780 – 2461 mm/ Tahun

3. Keadaan Sosial

Penduduk Kampung Pinang Sebatang Timur berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang ada yaitu suku melayu, jawa, minang, batak, nias, dan ambon. Tapi dari banyak nya suku-suku di kampung ini tetap terjaga kerukunan dan karifan masyrakat. Kampung Pinang Sebatang Timur dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Kampung Pinang Sebatang Timur mempunyai jumlah penduduk 8.864 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 4.871 jiwa, perempuan 3.993 orang dan 2.596 KK, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Yang Tersebar di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 2018/2019

Dusun	Laki – Laki	Perempuan	Total KK
Dusun I Pertiwi	**576**	**592**	**359 KK**
Dusun II Bunut	**2634**	**1916**	**1255 KK**
Dusun III Indah	**1661**	**1485**	**982 KK**
Total	**4871**	**3993**	**2596 KK**

(Sumber Data APBDes Desa Pinang Sebatang Timur 2018/2019)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Pinang Sebatang Timur sebagai berikut :

Tabel IV.2 Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 2018/2019

Dusun	SD	SMP	SMU	Akademi	Sarjana
Dusun I Pertiwi	167	494	368	19	15
Dusun II Bunut	390	1417	1298	75	72
Dusun III Indah	332	702	796	48	24
Total	889	2613	2462	142	111

(Sumber Data APBDes Desa Pinang Sebatang Timur 2018/2019)

Karena Kampung Pinang Sebatang Timur merupakan Kampung Industri maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai karyawan swasta dan buruh di perusahaan besar seperti, PT. Indah Kiat Pulp & Paper , PT. Habi, PT. Holcim, PT. Rabana dan PT lainnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.3 Jumlah Pekerjaaan di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 2018/2019

PNS	Abri/ Polri	Swasta	Petani	Nelayan	Buruh
50	3	2253	232	25	2943

(Sumber Data APBDes Desa Pinang Sebatang Timur 2018/2019)

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1 Jumlah Kepemilikan Ternak di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 2018/2019

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain
± 1007	± 211	± 78	± 8	-

(Sumber Data APBDes Desa Pinang Sebatang Timur 2018/2019)

Kondisi sarana dan prasarana umum Kampung Pinang Sebatang Timur secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1 Jumlah Sarana dan Prasarana di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 2018/2019

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/VOLUME	KETERANGAN
1	Kantor Kampung	1 Unit	
2	Puskesmas Pembantu	1 Unit	
3	Masjid	5 Unit	
4	Musalla	5 Unit	
5	PAUD	3 Unit	
6	Taman Kanak-kanak	4 Unit	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7	SD	3 Unit	
8	SMP	2 Unit	
9	SMA/Madrasah Aliah	1 Unit	
10	MDA	2 Unit	
11	Sungai		
12	Jalan Pemda		
13	Jalan Lingkungan		
14	Lapangan Bola Kaki	1 Ha	
15	Lapangan Bola Volly	5 Unit	
16	Poskesdes / Posyandu	6 Unit	
17	Dermaga	1 Unit	
18	Gedung PKK	1 Unit	
19	Tower	4 Unit	
20	Balai Kesenian		
21	Jembatan (Leghton)		
	Dst		

(Sumber Data APBDes Desa Pinang Sebatang Timur 2018/2019)

4. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Kampung Pinang Sebatang Timur bermata pencaharian sebagai Karywan , sebagian ada nelayan, petani, buruh , motong kebun karet dan sawit dengan penghasilan rata-rata kurang dari Rp 1.300.000,- perbulan. Selain sector non-formal, masyarakat Kampung Pinang Sebatang Timur

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagian disektor formal seperti PNS, Pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis dan lain-lain.

B. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Kampung Pinang Sebatang Timur dibagi menjadi 3(Tiga) dusun, dan masing – masing dusun memiliki 2 RK dalam 1 dusun.

Dusun I Pertiwi memiliki 2 RK dan RT berjumlah 5 ,

Dusun II Bunut memiliki 2 RK dan RT berjumlah 12,

Dusun III Indah memiliki 2 RK dan RT berjumlah 7.

Struktur Organisasi Pemerintah Kampung (SOPK)

Struktur Organisasi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Empat menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Kampung dengan Pola Minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

GAMBAR IV.1 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

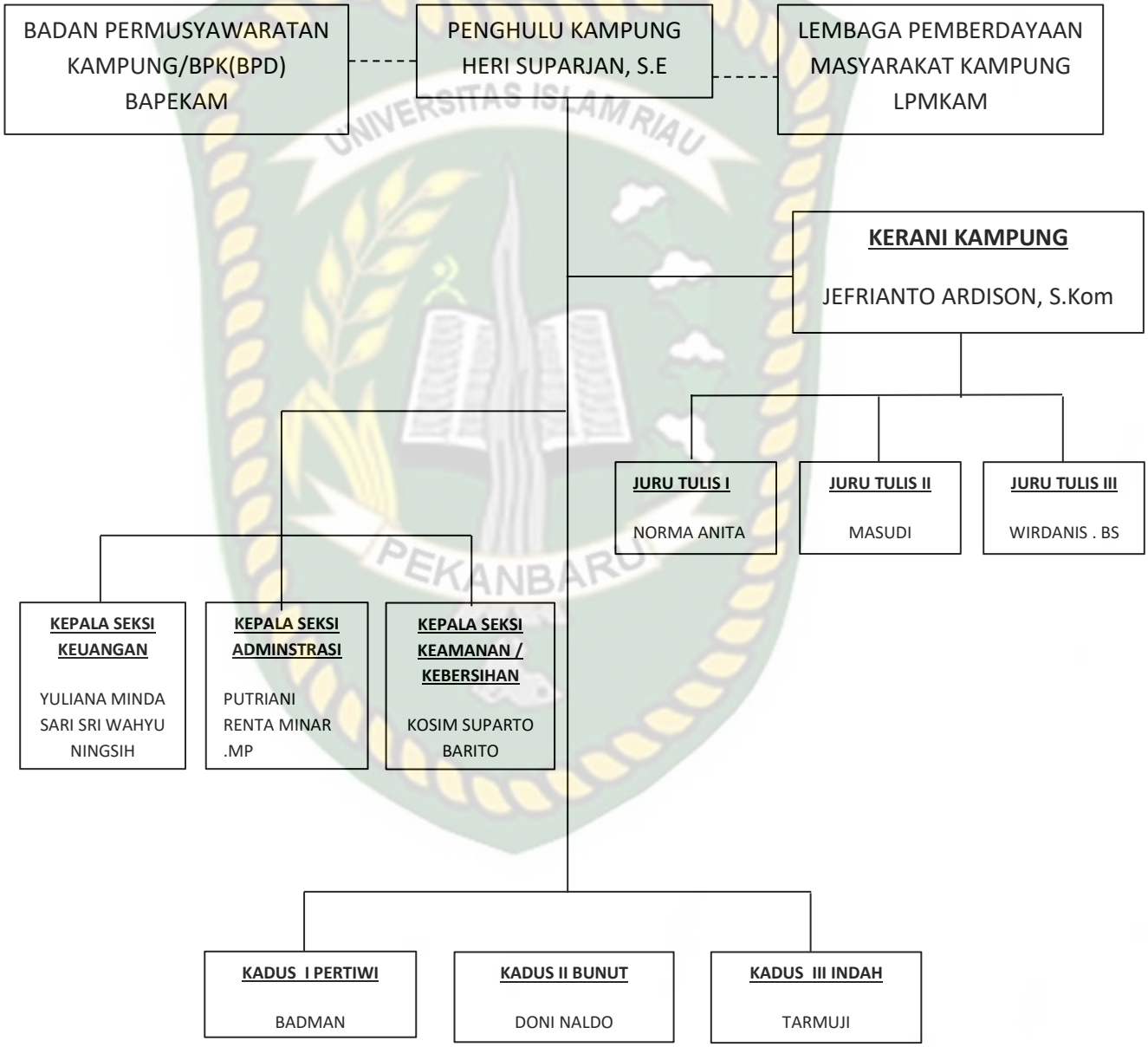

(Sumber Data Desa Pinang Sebatang Timur 2018/2019)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Keterangan Singkatan:

1. Penghulu adalah Kepala Kampung

2. Kerani adalah Sekretaris Kampung

3. JuruTulis I adalah Kaur Pemerintahan

4. Juru Tulis II adalah Kaur Pembangunan

5. JuruTulis III adalah Kaur Umum

6. Kadus adalah Kepala Dusun

C. Tugas pokok dan Fungsi Kepala Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juga menjelaskan hal yang sama yaitu pada pasal 12 yang mengatakan bahwa :

1. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.
2. Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari skertaris desa dan perangkat desa lainnya.
3. Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas:
    a. Sekertaris desa;
    b. Pelaksana teknis lapangan;
    c. Unsur kewilayaan
4. Jumlah perangkat Desa sebgaimana dimaksud pada ayat (2). Disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang tercantum pada pasal 14 menjelaskan tentang Tugas,Wewenang,Kewajiban dan Hak Kepala Desa yang berbunyi:

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang:
   a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
   b. Mengajukan rancangan peraturan peraturan desa
   c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
   d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
   e. Membina kehidupan masyarakat desa
   f. Membangun perekonomian desa
   g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
   h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraaturan perundang-undangan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kemudian dalam pasal 15 juga dijelaskan tentang tugas dan wewenangnya, yaitu :

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Kepala Desa mempunyai kewajiban :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,melaksanakan Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Melaksanakan kehidupan demokarasi;
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi,Korupsi, dan Nepotisme;
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

m. Membina,mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selanjutnya pada Peraturan Kerjasama Desa, yang menjelaskan tentang Kerjasama Desa pada Pasal 4 yang berbunyi:

1. Bidang Kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Bidang Kerjasama sebagaimana dimkasud ayat (1) meliputi:
    a. Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa;
    b. Bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
    c. Bidang Kesehatan;
    d. Bidang Sosial Budaya;
    e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, 2, 3, 4, 5 tentang Desa yang baru ditetapkan menjelaskan bahwa :

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarakan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarahantara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan penelitian yang mengangkat judul Penyelenggaraan Koordinasi Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal pengambilan kesimpulan. Adapun data dan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini akan di paparkan sebagai berikut:

A. Identitas Informan

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang akan berkaitan dengan identitas informan dan hasil jawaban yang akan di peroleh hasil dari wawancara

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi pekerjaan atau jabatan yang ada di kantor-kantor pemerintahan dan perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga non departemen. Tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi cara berfikir dan tingkat wawasan yang di miliki seseorang, maka semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula keahlian dan pola fikir yang dimilikinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel :V.1 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tentang Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Informan	Tingkat Pendidikan	jumlah
Heri Suparjan	S.1	1
Jefrianto Ardison	S.1	1
Putriani	SMA	1
BM Darusman Simanjuntak	SMA	1
Suraji	SMA	1
Jonniza	SMA	1
Dedi Mirwan	SMA	1
Lisna Nur Amalia	SMA	1
Hendri	SMP	1
R. Sihotang	SMA	1
Kaliz M	SMP	1
Jumlah		**11**

Sumber : Modifikas Penulis 2019

Dari tabel V.1 dapat di lihat tingkat pendidikan responden di dominasi oleh tingkat S.1 yaitu 2 orang responden, sedangkan informan lulusan SMA sebanyak 7 responden, SMP 2 orang responden dan didominasi lulusan SMA dan SMP.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Berdasrkan Tingkat Umur

Tabel :V.1 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur Tentang Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Informan	Tingkat Umur	Jumlah
Heri Suparjan	52 Tahun	1
Jefrianto Ardison	30 Tahun	1
Putriani	32 Tahun	1
BM Darusman Simanjuntak	42 Tahun	1
Suraji	45 Tahun	1
Jonnizar	50 Tahun	1
Dedi Mirwan	28 Tahun	1
Lisna Nur Amalia	34 Tahun	1
Hendri	45 Tahun	1
R. Sihotang	55 Tahun	1
Kaliz M	50 Tahun	1
Jumlah		**11**

Sumber : Modifikas Penulis 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan V.2 diatas dapat dilihat bahwa kelompok umur yang paling dominan yaitu 30-40 tahun sebanyak 3 orang, kelompok umur 40-50 tahun sebanyak 5 orang,Sedangkan kelompok umur 50-60 tahun sebanyak 3 orang.

Untuk memberikan pengaruh terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan menuntaskan suatu permasalahan dengan jalan pikiran yang lebih matang dan lebih bijak. Adapun tingkat umur informan dalam penelitian Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian tentang Penyelenggaraan Tugas Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Secara Partisipatif di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah untuk melihat sejauh mana Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Fisik Secara Partisipatif, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Seacara Partisipatif.

Setelah dilakukan wawancara kepada responden, maka hasil dari penelitian tersebut akan penulis uraikan scara berturut-turut sesuai indikator, sebagai berikut:

1. Mengadakan Pertemuan Resmi

Mengadakan Pertemuan Resmi adalah menandakan rapat atau musyawarah dengan waktu dan lokasi yang ditentukan, guna untuk melakukan kerjasama dan bertukar pikiran untuk memecahkan suatu masalah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pelaksanaan indikator menandakan pertemuan resmi ini sangat diperlukan dalam suatu instansi, apalagi yang berhubungan dengan tugas Kepala Desa yang Mengkoordinasikan Pembangunan Secara Pertisipatif. Karena dalam indikator ini Kepala Desa bersama staf dan oknum pemerintah lainnya bisa saling bertukar pikiran dan saling berkerjasama untuk suatu desa agar sesuai dengan visi dan misi yang ada. Untuk pertemuan Kepala Desa dan Staf dapat dilihat pada lampiran.

Berdasarkan wawancara kepada Heri Suparjan selaku Kepala Desa Pinang sebatang Timur pada tanggal 06 Januari 2020 di kantor desa pinang sebatang timur, penulis menanyakan bagaimana pelaksanaan dalam mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur.

"*Dalam mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif, dari pihak camat kami memberikan fasilitas didalam perencanaan pembangunan yang sudah dituangkan dalam RPJMDes dan dituangkan Kebijakan Pemerintah Desa (RKP) dan diimplementasikan ke RKPDes lalu diperjelas lagi dan dituangkan kedalam (APBDes)"*

Adapun maskud penjelasan dari RPJMDes yang disebutkan oleh Bapak Heri Suparjan, SE adalah:

a. Menjabarkan Visi,Misi dan Program Pemerintah desa dalam kurun waktu 6 tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
b. Sebagai wujud realisasi dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut dengan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban membangun desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

c. Memberikan ruang dan waktu masyarakat desa untuk berpartisipasi dengan sesungguhnya dalam proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan serta pelestarian kegiatan.

Kemudian tujuan dari RPJM juga dijelaskan sebagai berikut:

a. Memberikan arah dan panduan pembangunan Desa Pinang Sebatang Timur.
b. Adanya suatu dokumen perencanaan pembangunan desa yang menjadi arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan sasaran strategis untuk masa 6 (enam) tahun.
c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES), APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
d. Sebagai bahan evaluasi dan refleksi pembangunan.
e. Sebagai media informasi.
f. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Desa terhadap rencana pembangunan dan realisasi serta capaian pembangunan desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun penjelasan yang dimaksud oleh Kepala Desa dan kaur Pembangunan mengenai RPJMDes ialah Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan pleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengelokasian sumber daya desa dalam rangkamencapai tujuan pembangunan desa.

Agar tujuan pembangunan desa benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan desa hendaklah berorientasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan segelintir elit desa, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat desa tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Kemudian juga penulis menanyakan kepada Bapak Heri Suparjan perihal apakah ada pertemuan resmi yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam membahas pembangunan fisik secara partisipatif yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur.

"Pertemuan resmi sudah pernah kita lakukan,apalagi dengan membahas pembangunan yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur.Pertemuan ini biasanya kami adakan dalam waktu-waktu tertentu, dalam pertemuan ini biasanya kita mengumpulkan semua tokoh masyarakat dan organisasi lainnya dan saling bertukar pikiran sekaligus membahas pembangunan-pembangunan yang ada."

Dalam hal ini Kepala Desa setempat menjelaskan bahwa pertemuan resmi antar Pemerintah Desa dengan organisasi-organisasi yang ada di Desa Pinang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebatang Timur sudah pernah dilakukakn walaupun diadakannya dalam waktu tertentu guna membahas pembangunan yang ada.

Selanjutnya penulis menanyakan hal apakah ada pertemuan resmi itu di adakan oleh Permerintah Desa Kepada Bapak Heri Suparjan selaku Kepala Desa Pinang Sebatang Timur.

"Pertemuan resmi itu dilakukakn, dalam hal ini biasanya kami membahas penyusunan RPJMDes, kemudian dirapatkan dan dibuat berita acara.Pertemuan resmi biasanya bisa dilakukakn dalam acara wirid akbar seluruh dan seluruh RT-RW pun datang"

Dalam waktu bersamaan penulis juga menanyakan perihal pertemuan resmi kepada Bapak Amril selaku kaur Pembangunan di Desa Pinang Sebatang timur. Karena kaum pembangunan salah satu jabatan yang paling berpengaruh untuk merialisasikan pembangunan disuatu Desa.

"Pertemuan resmi ini tetap ada dilakukakan, biasanya membahas Musrenmbang tingkat desa serta rapat RT-RW untuk membahas masalah pembangunan yang akan dilakukan. Kemudian kita juga membahas perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Dari penjelasan diatas pertemuan yang di adakan bukan saja hanya membahas keadaan Desa, tetapi juga membahas masalah pembangunan yang sedang berjalan maupun perencanaan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya.

Kemudian pada tanggal 19 November 2019 penulis melanjutkan wawancara dalam waktu bersamaan kepada Bapak R. Sihotang (ketua RT), Bapak Hendri (Ketua

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

RW) dan Bapak Jonnizar (Kepala Dusun) di Desa Pinang Sebatang Timur untuk mengkonfirmasi hasil wawancara yang didapatkan penulis dari Bapak Heri Suparjan selaku Kepala Desa, dalam hal ini penulis menanyakan tentang apakah ada pemerintah desa mengadakan pertemuan resmi dan membahas masalah pembangunan yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur.

Dalam Pertanyaan ini yang menjawab pertama Bapak Jonnizar selaku Kepala Dusun di Desa Pinang Sebatang Timur.

"Pertemuan resmi itu diadakan oleh pemerintah desa,dalam hal ini biasanya membahas pembangunan yang sedang berjalan. Kemudian membahas perencanaan pembangunan selanjutnya."

Selanjutnya, disusul oleh jawaban dari Bapak Hendri selaku Ketua RW (Rukun Tetangga) di Desa Pinang Sebatang Timur.

"Setiap desa pasti ada pertemuan resminya, kalau pembahasan yang di bahas biasanya sama saja dengan yang disebutkan oleh pak Kadus yaitu membahas masalah pembangunan yang sedang berjalan.

Kemudian disusul dengan jawaban Bapak R. Sihotang selaku RT (Rukun Tetangga) di Desa Pinang Sebatang Timur.

"iya, ada pertemuan resmi itu. Biasanya kita membahas masalah pembangunan drainase, semenisasi dan tergantung dari rencana RPJMDes untuk perencanaan pembangunan selanjutnya.

Selanjutnya, pada tanggal 20 November 2019 dalam waktu yang bersamaan penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak Suraji (Ketua LPM), Bapak BM

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Darusalam Simanjuntak, dan Bapak Kaliz M (Tokoh Masyarakat). Dalam wawancara ini penulis masih menanyakan perihal pertemuan resmi dan apa saja pembahasan yang dibahas pada pertemuan itu diadakan. Karena LPM, BPD dan Tokoh Masyarakat ini sangat berpengaruh dalam pembangunan disetiap desa.

Pertanyaan ini pertama kali dijawab oleh Bapak Suraji selaku Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

"Pernah pertemuan resm itu salah satu kegiatan yang wajib untuk dilakukan apalagi di desa-desa yang sedang mekar. Pembahasannya itu tidak jauh dari masalah pembangunan yang ada di desa ini."

Kemudian disusul oleh jawabnya Bapak BM Darusman Simanjuntak selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

"Sudah pernah, pertemuan resmi itu hanya sesekali diadakan dan pembahsannya juga mengenai perkembangan desa dan perencanaan pembangunan desa untuk tahap selanjutnya, kemudian membahas keuangan desa dan sebagainya yang berhubungan dengan desa."

Selanjutnya disambung lagi dengan jawaban Bapak Kaliz M selaku Tokoh Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur.

"Jawaban saya sama seperti bapak Darusman dan Bpak Suraji, saya rasa jawaban mereka berdua sudah mewakili. Kalau pembahassan pembangunan itu memang selalu ada ketika pertemuan resmi."

Pada tanggal 21 November 2019 dalam waktu yang bersamaan penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak Dedi Mirwan (Ketua Karang Taruna) dan Ibu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lisna Nur Amalia (Ketua PKK) menanyakan perihal pertemuan resmi yang diadakan oleh pemerintah desa dan pembahasan apa saja.

Berdasarkan jawaban dari Ibu Lisna Nur Amalia selaku Ketua PKK di Desa Pinang Sebatang Timur mengenai pertemuan resmi dan pembahasannya adalah.

"Ada, dan semua organisasi-organisasi diundang dalam pertemuan tersebut. Biasanya membahas pembangunan dan perkembangann apa saja yamg ada di Desa Pinang Sebatang Timur.

Kemudian dilanjutkan dengan jawaban dari Bapak Dedi Mirwan selaku Ketua Karang Taruna Desa Pinang Sebatang Timur.

"iya kami semua diajak dan pemerintah desa juga pernah mengadakan pertemuan resmi itu. Pembahasannya sama saja yang disebutkan oleh Ibu Lisna."

Dari penjelasan Bapak Wargono (KaDus), Bapak R. Sihotang (Ketua RT), Bapak Hendri (Ketua RW), Bapak Suraji (Ketus LPM), Bapak Kaliz M (Tokoh Masyarakat), Bapak Dedi Mirwan (Ketua Karang Taruna) dan Ibu Lisna Nura Amalia (Ketua PKK) dapat kita simpulkan bahwa pertemuan resmi itu sudah pernah dilakukan sesuai dengan hasil wawancara yang didapat penulis dari Bapak Heri Suparjan selaku Kepala Desa dan dalam pertemuan resmi itu membahas pembangunan yang sedang berjalan dan membahas pembangunan untuk tahap selanjutnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemerintah desa dan tokoh masyarakat disertakan dengan daftar hadir dan contoh materi rapat yang didapatkan dapat dilihat pada lampiran.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Adanya Kerjasama

Adanya Kerjasama adalah bertujuan untuk menentukan arah kebijakan agar sesuai apa yang diharapkan, kemudian membuat perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Pelaksanaan indikator Adanya Kerjasama ini sangat penting dalam dunia pembangunan, dimana pembangunan adalah kata yang digunakan secara meluas dalam semua media di seluruh dunia dan merupakan konsep yang kerap kali disebut dan diperbincangkan oleh semua lapisan masyarakat terutama dikalangan ahli politik, wartawan, orang pemerintahan dll. Pembangunan itu sendiri berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan menjadi syarat utama pembangunan.

Dalam indikator ini penulis menanyakan masalah apakah adanya kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan koordinasi pembangunan secara partisipatif di Desa Pinang Sebatang Timur atau tidak dengan Bapak Heri Suparjan (Kepala Desa Pianang Sebatang Timur) di kantor Desa Pinang Sebatang Timur pada tanggal 15 November 2019.

"Kerjasama itu sudah pasti ada, apalagi masalah pembangunan tentunya membutuhkan kerjasama yang baik dengan organisasi-organisasi di Desa Pianang Sebatang Timur. Selain itu kerjasama ini dikerjakan langsung oleh tim pelaksanaan kegiatan sehingga pembangunan tersebut mudah direalisasikan"

Menurut penjelasan Bapak Heri Suparjan adanya kerjasama yang dilakukan itu sangat berpengaruh dalam kegiatan pembangunan fisik yang ada di Desa Pinang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebatang Timur. Semakin erat kerjasama maka semakin cepat pula pembangunan itu direalisasikan.

Pada hari yang sama tanggal 15 November 2019, penulis juga menanyakan kepada Bapak Jefrianto Ardison selaku Sekertaris Desa, perihal apakah ada kerjasama antara pemerintah desa dengan organisasi lainnya mengenai pembangunan.

"iya, kami ada memiliki kerjasama dalam melakukan koordinasi. Apalagi masalah pembangunan itu sangat penting. selain itu juga kita memiliki kerjasama lainnya sperti gotong royong antara warga, kemudian rapat bersama RT-RW dan masyarakat yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur."

Kemudian dalam waktu bersamaan penulis menanyakan perihal yang sama kepada Ibu Putriani selaku Kaur Pembangunan di Desa Pianang Sebatang Timur.

"Kerjasama itu tetap ada dan untuk masalah pembangunan itu kami memiliki tim pelaksana untuk kegiatan pembangunan fisik yang memberikan pengaruh besar untuk terlaksananya pembangunan yang sedang berjalan maupun dalam tahap perencanaan."

Dari penjelasan diatas sudah jelas adanya kerjasama dari pemerintah desa terkait pembangunan yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur. Selain kerjasama dalam hal pembangunan, ada juga kerjasama seperti gotong royong dan lainnya.

Selanjutnya, pada tanggal 16 November 2019 penulis melanjutkan wawancara dalam waktu yang bersamaan kepada Bapak R. Sihotang (Ketua RT), Bapak Hendri (Ketua RW), dan Bapak Jonnizar (Kepala Dusun) di Desa Pinang Sebatang Timur.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Ada kerjasama itu, misalnya kegiatan pembangunan, jaga ronda malam dan gotong royong. Hanya itu saja."

Kemudian disambung oleh jawaban dari Bapak Hendri selaku ketua RW di Desa Pinang Sebatang Timur.

"Iya kerjasama itu sudah pasti ada. Apalagi masyarakat disini wajib di ikutsertakan dalam hal apapun, tapi masih ada beberapa masyarakat tidak peduli dan tidak mau ikut serta, hal ini menjadi kendala dalam pembangunan karena partisipasi masyarakat sangat penting untuk menunjang proses pembangunan berjalan lancar."

Selanjutnya, disusul dengan jawaban dari Bapak R. Sihotang selaku Ketua RT di Desa Pinang Sebatang Timur.

"Iya ada, kalau kerjasama itu tidak ada bisa jadi tidak akan terwujud pembangunan yang sudah direncanakan bahkan pembangunan yang sedang dijalankan juga bisa terbengkalai begitu saja."

Dari jawaban diatas, dapat kita lihat bahwa adanya kerjasama antara pihak pemerintah desa dengan masyarakat dan organisasi-organisasi yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur. Jika tidak adanya kerjasam maka akan berdampak buruk untuk pembangunan yang sedang berjalan bahkan yang sedang direncanakan untuk kedepannya.

Selanjutnya, pada tanggal 17 November 2019 dalam waktu bersamaan penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak Suraji (Ketua LPM), Bapak BM Darusman Simanjuntak, dan Bapak Kaliz M (Tokoh Masyarakat). Dalam wawancara ini penulis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masih menanyakan perihal kerjasama antara pemerintah desa dengan organisasi yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur.

Pertanyaan ini penulis tanyakan pertama kepada Bapak Suraji selaku Ketua LPM.

"Iya,pemerintah desa pastinya ada memiliki kerjasama dengan organisasi yang berkaitan. Apalagi kerjasama itu sangat dibutuhkan dalam suatu kegiatan, agar kegiatann tersebut dapat terlaksana dengan baik."

Kemudian penulis juga menanyakan pertanyaan tersebut kepada Bapak BM Darusman Simanjuntak selaku Ketua BPD di Desa Pinang Sebatang Timur.

"Kerjasama itu memang ada, apalagi dengan BPD karena kami saling berkesinambungan. Biasanya kerjasama itu bisa dalam bentuk antara pemuda-pemudi agar mencapai tujuan yang di inginkan."

Selanjutnya disusul oleh jawaban dari Bapak M. Kasir selaku Tokoh Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur.

"Ada, karena sebagai salah satu tokoh masyarakat dan pemerintah desa memang harus memiliki kerjasama yang erat. Apalagi seperti yang disebutkan pleh Bapak Darusman dan Bapak Suraji, kerjasma itu harus ada agar seluruh perencanaan bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya masing-masing. Ditambah lagi dengan adanya pembangunan fisik yang sedang berjalan di Desa Pinang Sebatang Timur ini."

Adanya bentuk kerjasama antara pemerintah desa yang dijelaskan oleh Ketua BPD, Ketua LPM, dan Tokoh Masyarakat memang sudah terlihat jelas. Karena

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bentuk kerjasama itu memang sangat mempengaruhi perkembangan suatu desa apalagi dibidanng pembangunan.

Pada tanggal 18 November 2019 dalam waktu yang bersamaan penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak Dedi Mirwan selaku (Ketua Karang Taruna) dan Ibu Lisna Nur Amalia (Ketua PKK) menanyakan perihal mengenai bentuk kerjasama dari Pemerintah Desa yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur.

Jawaban dari Ibu Lisna Nur Amalia selaku Ketua PKK Desa Pinang Sebatang Timur mengenai bentuk kerjasama.

"Iya, kerjasama itu pasti ada. Misalnya antara pemerintah desa dengan PKK yang sangat mempengaruhi kegiatan-kegiatan ibu-ibu PKK, walaupun sebenarnya tidak ada sangkut pautnya mengenai pembangunan. Tetapi keterampilan yang dibuat oleh para ibu-ibu PKK sangat berpengaruhi untuk perkembangan di Desa Pinang Sebatang Timur."

Kemudian penulis juga menanyakan perihal yang sama dengan Bapak Dedi Mirwan selaku Ketua Karang Taruna di Desa Pinang Sebatang Timur.

"Kerjasama itu memang harus ada diantara organisasi dan pemerintah desa, karen memiliki pengaruh yang sangat kuat."

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembangunan yang sedang berjalan dan perencanaan pembangunan harus diperlukannya kerjasama yang erat antara pemerintah desa dan masyarakat setempat karena kerjasama yang baik akan mempengaruhi proses pembangunan desa. Dari indikator ini masih belum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terlaksana sepenuhnya dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang tidak mau ikut serta dalam proses pembangunan desa.

3. Mengadakan Pertemuan Informal.

Adapun maksud dari mengadakan pertemuan informal adalah salah satu pertemuan yang dilakukan di luar gedung yang tidak bersifat resmi, dalam hal ini biasanya membahas masalah-masalah yang ada kemudian saling memberikan pengarahan dan konsultasi.

Dari indikator mengadakan pertemuan informal ini termasuk salah satu hal yang penting untuk suatu kepentingan pembangunan, dimana hal ini membahas masalah-masalah pembangunan yang ada dilapangan. Seperti mencari solusi, bertukar pikiran dan lainnya.

Pada tanggal 15 November 2019 penulis menanyakan masalah apakah pertemuan informal dari Kepala Desa dalam membahas pembangunan yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur, Kepada Bapak Heri Suparjan.

"Pernah, adapun dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat sambil duduk di kedai kopi dan mencari solusi agar pembangunan fisik bisa cepat terlaksana dengan baik."

Menurut Bapak Heri Suparjan, selain pertemuan resmi beliau juga pernah melakukan pertemuan informal sambil duduk-duduk di kedai kopi untuk membicarakan permasalahan dan mencari solusi agar pembangunan dan perencanaan pembangunan yang ada bisa berjalan dengan baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada hari yang sama tanggal 15 November 2019, penulis juga menanyakan kepada Bapak Jefrianto Ardison selaku Sekertaris Desa, perihal apakah pihak desa pernah mengadakan pertemuan informal dengan tokoh masyarakat ataupun lembaga lainnya.

"Belum pernah, karena sejauh ini pembahasan itu hanya dilaakukan pada saat rapat formal saja."

Kemudian dalam waktu bersamaan penulis menanyakan perihal yang sama kepada Ibu Putriani selaku Kaur Pembangunan di Desa Pinang Sebatang Timur.

"Selama ini tidak ada yang namanya pertemuan informal. Karena semua pembahasan ataupun masalah-masalah yang ada hanya dibahas ketika rapat dan diluar dari itu tidak pernah.

Dari penjelasan diatas, tidak adanya pertemuan formal yang dilakukakn oleh Kepala Desa untuk membahas perencanaan dan pembangunan yang ada dilakukan Desa Pinang Sebatang Timur. Seharusnya ini dilakukan guna mempererat kerjasama dan tidak terlalu fokus pada saat rapat.

Kemudian, pada tanggal 16 November 2019penulis melanjutkan wawancara dalam waktu yang bersamaan kepada Bapak R. Sihotang (Ketua RT), Bapak Hendri (Ketua RW) dan Bapak Jonnizar (Kepala Dusun) di Desa Pinang Sebatang Timur. Dalam hal ini penulis menanyakan tentang pertemuan informal yang di adakan oleh pihak desa guna membahas pembangunan fisik yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun hasil jawaban dari yang penulis tanyakan kepada Bapak Jonnizar selaku Kepala Dusun di Desa Pinang Sebatang Timur ialah.

"seingat saya tidak pernah diadakan pertemuan informal sperti itu, walaupun memang seharunyas dilakukan apalagi mengingat adanya pembangunan yang sedang dilaksanakan."

Kemudian sesuai oleh jawaban dari Bapak R. Sihotang selaku Ketua RT di Desa Pinang Sebatang Timur.

"Memang belum pernah dilakukan pertemuan seperti itu. Karena biasanya semua itu dibahas ketika rapat saja."

Selanjutnya penulis juga menanyakan hal yang sama kepada Bapak R. Sihotrang selaku Ketua RT di Desa Pinang Sebatang Tualang.

"Tidak ada itu pertemuan informal. Paling pertemuan formal saja, dengan mengundang seluruh organisasi ataupun tokoh masyarakat yang ada di desa ini saja.

Dari jawaban diatas, dapat kita lihat bahwa memang tidak adanya pertemuan informal yang dilakukan oleh pihak desa.

Selanjutnya, pada tanggal 17 November 2019 dalam waktu bersamaan penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak Suraji (Ketua LPM), Bapak BM Darman Simanjuntak (Ketua BPD), dan Bapak Kaliz M (Tokoh Masyarakat). Dalam wawancara ini penulis masih menanyakan perihal apakah ada pertemuan informal yang diadakan oleh pemerintah desa.

Selanjutnya penulis penulis juga menanyakan perihal ini kepada Bapak Suraji selaku Ketua LPM di Desa Pinang Sebatang Timur.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Tidak ada, disini pertemuan itu hanya ketika rapat saja. Kalaupun diluar juga tidak ada membahas masalah apapun."

Penulis juga menanyakan kepada Bapak BM Darusman Simanjuntak selaku Ketua BPD.

"Sama saja seperti yang lainnya. Memang tidak ada pertemuan informal itu, karena semuanya sudah dibahas ketika rapat yang diadakan oleh pihak desa. Seharusnya memang diadakan pertemuan seperti itu."

Kemudian disusul dengan jawaban Bapak Kaliz M selaku Tokoh Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur.

"Belum ada, jawaban sama-sama saja seperti bapak-bapak sebelumnya. Karena semua itu sudah dibahas ketika rapat."

Dari jawaban diatas, dapat kita lihat bahwa memang tidak adanya pertemuan informal dan pertemuan itu dilaksanakan jika ada rapat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa belum pernah diadakannya pertemuan informal yang dilakukan diluar rapat formal.

Pada tanggal 18 November 2019 dalam waktu yang bersamaan penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak Dedi Mirwan (Ketua Karang Taruna) dan ibu Lisna Nur Amalia (Ketua PKK) menanyakan perihal mengenai apakah ada pihak desa mengadakan pertemuan informal kepada organisasi lainnya guna membahas masalah pembangunan di Desa Pinang Sebatang Timur.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pertanyaan ini penulis tanyakan kepada Ibu Lisna Nur Amalia selaku Ketua PKK di Desa Pinang Sebatang Timur.

"Tidak pernah, Karena PKK itu memang memiliki tugasnya sendiri. Kalau untuk membahas masalah pembangunan mungkin sudah ada tim khusus tersendiri dan saya juga tidak tahu masalah seperti itu."

Selanjutnya pertanyaan ini juga penulis tanyakan kepada Bapak Dedi Mirwan selaku ketua Karang Taruna di Desa Pinang Sebatang Timur.

"iya, memang tidak pernah. Mungkin saja mereka sudah memiliki tim khusus untuk membahas masalah pembangunanitu. Bisa jadi sama organisasi yang lainnya sudah pernah, kalau sama Karang Taruna ini memang belum pernah."

Dari hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari staf pemerintah desa dan masyarakat setempat dapat dilihat pada lampiran**.** Hal ini dapat kita simpulkan karena adanya perbedaan jawaban antara Kepala Desa dengan Organisasi lainnya. Ketika Kepala Desa mengatakan pernah melakukan pertemuan informal, sementara jawaban dari organisasi lainnya memberikan jawaban bahwa belum pernah dilakukan guna mempererat kerjasama suatu tujuan.

4. Mengangkat Suatu Tim.

Mengangkat suatu tim adalah dimana perlunya suatu tim khusus untuk menjalankan pembangunan desa yang ada, misalnya yang sering kita ketahui sperti LPM dan organisasi lainnya. Guna memberikan penjelasan dengan rinci dan memberikan bimbingan kepada organisasi-organisasi yang ada agar tujuan yang diinginka bisa tercapai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada tanggal 15 November 2019 penulis menanyakan kepada Bapak Heri Suparjan selaku Kepala Desa masalah apakah ada pihak mengangkat tim khusus untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik di Desa Pinang Sebatang Timur.

"Iya, kami pernah mengangkat tim khusus. Adapun tim pelaksanaanya yaitu Kaur Pembangunan selaku ketua, Ketua LPM selaku Sekertaris dan beberapa orang dari unsur masyarakat selaku anggota."

Adanya pengangkatan suatu tim untuk melaksanakan pembangunan itu sangat berpengaruh dengan berjalannya kegiatan pembangunan ini.

Pada hari yang sama tanggal 15 November 2019, penulis juga menanyakan kepada Bapak jefri selaku Sekertaris Desa, perihal apakah pihak desa pernah mengangkat suatu tim untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik di Desa Pinang Sebatnag Timur.

"Ada tim pelaksana itu, tim pelaksana harus dibentuk untuk kade-kader yang bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Selain itu adanya juga tim pelaksanaan kegiatan yang sudah ditunjuk oleh Kepala Desa dan Kaur Pembangunan."

Selanjutnya pertanyaan ini juga penulis tanyakan kepada Bapak Bobi selaku Kaur Pembangunan di Desa Pinang Sebtang Timur.

"Iya, memang ada tim pelaksana khusus. Yaitu dari Kaur Pembangunan sendiri dan dibantu oleh LPM serta Tokoh Masyarakat itu sendiri.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya tim pelaksana khusus untuk memperlancar kegiatan pembangunan ini. Adapun tim itu terdiri dari Kaur Pembangunan, LPM, dan Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Pinang Sebatang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Timur. Hal ini sesuai dengan dokumentasi rapat yang didapatkan peneliti yaitu penyedia materi rapat dan pemimpin rapat dilakukan oleh tim pelaksana khusus.

Kemudian dari empat indikator dapat kita simpulkan bahwa hasil dari penelitian penulis yang berjudul Penyelenggaraan Koordinasi Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, termasuk kategori cukup terlaksana.

Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan kepala desa, staf dan masyarakat pada rapat musrenbang yang menghasilkan keputusan sebgai berikut:

1. Bahwa pelindo menyanggupi perbaikan jalan pertiwi epanjang 58 M
   - 50 M di simpang tiga jalan raya pertiwi
   - M simpang empat penurunan
2. Bahwa PT Habi akan melaksanakan perbaikan jalan didpan PT Habi pengerjaan dimulai seminggu setelah deain jalan keluar dari Dinas PU
3. Bahwa PT Rabana akan memberikan keputusan seminggu setelah musyawarah

Berdasarkan hasil rapat diatas dapat dilihat pada halaman lampiran.

Adapun faktor-faktor penyebab yang ditemukan di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah sebagai berikut,yaitu:

1. Kurangnya pertemuan resmi dari Kepala Desa untuk membicarakan masalah pembangunan fisik yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur.
2. Kurang dilibatkannya masyarakat dalam proyek pembangunan fisik desa sehingga kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan desa setempat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Hasil kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Pinang Sebatang Timur masih belum tepat pada sasarannya yang dibutuhkan sehingga diperlukannya pertemuan informal agar masyarakat bisa ikut serta dalam pembangunan fisik cepat terealisasi.
4. Kurangnya partisipasi dari tim atau pun organisasi yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Pinang Sebatang Timur.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan data yang telah dilakukan mengenai Penyelenggaraan koordinasi Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, maka penulis membuat kesimpulan dan saran-saran agar bisa dijadikan bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

1. Mengadakan Pertemuan Resmi

Berdasarkan hasil dari peneilitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan peneliti mengenai indikator mengadakan pertemuan resmi memiliki hubungan dengan Penyelenggaraan koordinasi Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Dimana indikator mengadakan pertemuan resmi yang dilakukan staf desa dan masyarakat desa pinang sebatang timur untuk membangun kerja sama dan menjadi sarana untuk bertukar pikiran dalam memecahkan suatu masalah.

2. Adanya Kerjasama

Berdasarkan hasil dari peneilitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan peneliti mengenai indikator adanya kerjasama memiliki hubungan dengan Penyelenggaraan koordinasi Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Dimana indikator adanya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kerjasama yang dilakukan staf desa dan masyarakat desa pinang sebatang timur bertujuan untuk menentukan arah kebijakan agar sesuai dengan yang diharapkan karena kerjasama yang baik akan mempengaruhi proses pembangunan desa.

3. Mengadakan Pertemuan Informal

Berdasarkan hasil dari peneilitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan peneliti mengenai indikator adanya kerjasama memiliki hubungan dengan Penyelenggaraan koordinasi Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Indikator mengadakan pertemuan informal ini termasuk salah satu hal yang penting untuk kepentingan pembangunan, dimana mengadakan pertemuan informal dengan staff desa dan masyarakat setempat diharapkan dapat membahas masalah pembangunan di Desa Pinang Sebatang Timur lebih terbuka

4. Mengangkat Suatu Tim

Berdasarkan hasil dari peneilitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan peneliti mengenai indikator Mengangkat Suatu Tim memiliki hubungan dengan Penyelenggaraan koordinasi Pembangunan Fisik Secara Partisipatif Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Dimana perlunya suatu tim khusus untuk menjalankan pembangunan desa yang ada, guna memberikan penjelasan dengan rinci dan memberikan bimbingan kepada organisasi-organisasi yang ada agar tujuan yang diinginkan dalam pembangunan fisik di Desa Pinang Sebatang Timur dapat terlaksana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

1. Perlu dilakukannya pertemuan resmi antara staff desa dan masyarakat desa pinang sebtang timur untuk membicarakan masalah pembangunan fisik yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur.
2. Perlu dilibatkannya masyarakat dalam proyek pembangunan fisik desa agar terlaksana kerjasama antara staff desa dan masyarakat setempat.
3. Perlu dilakukannya pertemuan informal antara staff desa dan masyarakat setempat untuk membicarakan masalah pembangunan fisik yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur agar cepat terealisasi dan tepat sasaran.
4. Perlu partisipasi dari tim atau pun organisasi yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Pinang Sebatang Timur.
5. Perlu dilakukan tinjaun ulang terhadap pembangunan secara partisipatif mengingat banyaknya lahan kosong yang diperlukan oleh pemerintah desa.
6. Perlu diadakan sosialisasi oleh pihak staff desa kepada masyarakat setempat mengenai pembangunan yang akan dilakukan di Desa Pinang Sebtang Timur.
7. Perlu diadakan koordinasi secara berkesinambungan oleh staff desa dengan dinas-dinas yang terkait dalam proses pembangunan desa Pinang Sebtang Timur.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Abidin, Said Zainal,2012. *Kebijakan publik.* Jakarta, Salemba Humanika.

Awang, Aazam dan Wijaya, Mendra, 2012. *Ekologi pemerintahan.* Pekanbaru, Alfa Riau.

,http://carapedia.com/pengertian_definisi_pembangunan_info2042.html

Kansil, dan Chiristine (2003). Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta, Bumi Aksara.

Mathis, Robert L, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta, Edisi Kedua Salemba Empat.

Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru 1 & 2.* Jakarta, Rineka Cipta.

Ndraha, Taliziduhu, 2007. *Kybernologi Sebuah Scientific Movement.* Tangerang Banten, Siroa Credentia Center.

Ndraha, Taliziduhu, 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan.* Jakarta, Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif, 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah.* Jakarta, PT Gramedia Alex Media.

Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Erlangga.

Nugroho, Riau D, 2009. *Kebijakan Publik Formasi, Iplementasi dan Evaluasi.* Jakarta, Komputindo.

Farlan, Handayaningrat. 1991. *koordinasi :* PT. Toko Gunung Agung – Jakarta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasolong, Harbani, 2002. *Teori Administrasi Publik.* Bandung, Alfabeta.

Rasyid, Ryass, 2002. *Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika Kepemimpinan).* Jakarta, PT Warsit Watampone.

Sadu, Wasistiono, dan Tahir, Irwan, 2007. *Prospek Pengembangan Desa.* Bandung, Cv. Fokus Media.

Siagian, P Sondang, 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi.* Jakarta, Rineka Cipta.

Subarsono, Ag, 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaf,Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabete

Suhelmi, Ahmat, 2007. *Pemikiran Politik Barat.* Gramedia Pustaka.

Singarimbun, dan Effendi, Sofian, 2008. *Metode Penelitian Survai.* Jakarta, PustakaLP3ES.

Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan,* Edisi Revisi. Bandung, Bandar Maju.`

Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah, 2006. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia.* Bandung, Pustaka Setia.

Wasistiono, Sadu. (2006). *Prospek Pengembangan Desa.* Fokusmedia, Bandung.

Wasistiono, Sadu. (2001). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah.* Fokusmedia, Bandung.

Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan.* Yogyakarta. Graha Ilmu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dwipayana, Ari. 2003. *Pembaharuan Desa secara Partisipatif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :